

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN IBU RUMAH TANGGA PEMULUNG  
DI KELURAHAN JEMPONG BARU KOTA MATARAM**



Oleh  
Novitasari  
NIM 190302093

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2024**

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN IBU RUMAH TANGGA PEMULUNG DI  
KELURAHAN JEMPONG BARU KOTA MATARAM**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi persyaratan mencapai  
gelar**

**Sarjana Sosial**



**Oleh**

**Novitasari**

**NIM 190302093**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATA RAM**

**2024**

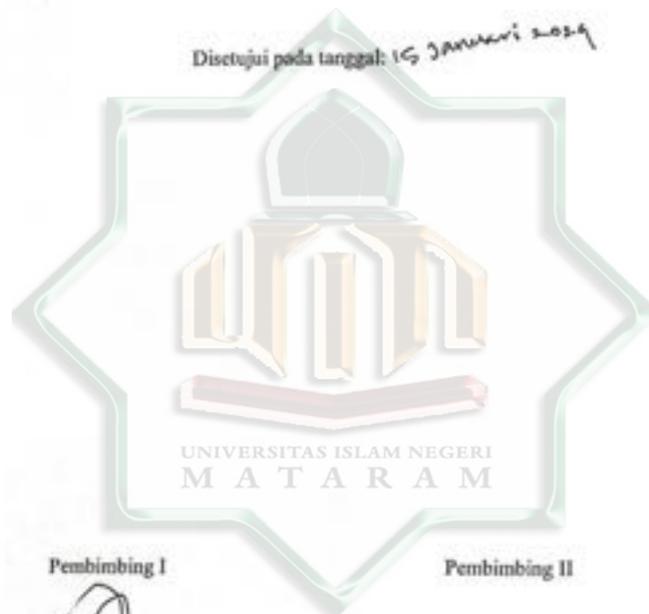
**HALAMAN LOGO**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Novitasari, Nims 190302093 dengan judul "Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 15 Januari 2024



Pembimbing I

Pembimbing II

Perpustakaan UIN Mataram

*Prof. Dr. Supripto, M. Ag*  
NIP. 197207202000310021

*Zaenudin Amcullah, M.A*  
NIP. 19920808201903019

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Mataram, 15 JAN 2024

**Hal: Ujian Skripsi  
Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wk, Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa/i : Novitasari

Nim : 190302093

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul : Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempöng Baru Kota Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan

*Wassalamu'alaikum, Wk, Wb.*

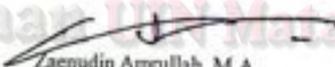
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Suprpto, M. Ag

NIP. 197207202000310021

Pembimbing II

  
Zaenudin Amrullah, M. A

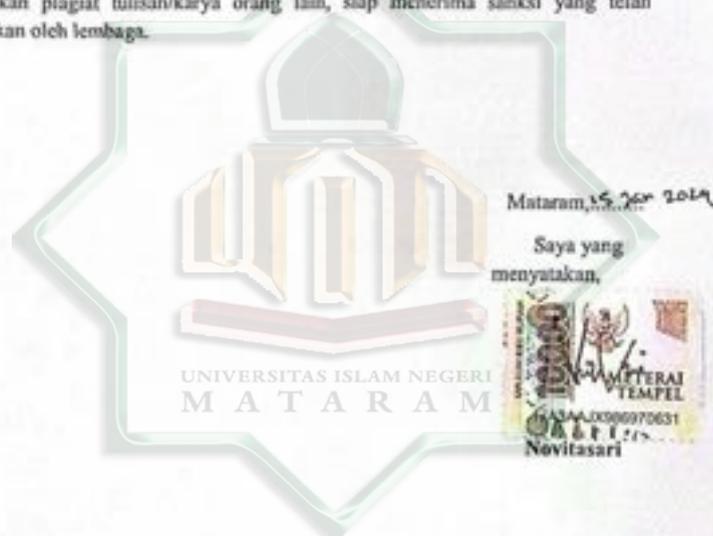
NIP. 19920808201903019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari  
NIM : 190302093  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Novitasari . NIM: 190302093 dengan judul "Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram" telah dipertaharkna di depan dewan penguji Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal:

**Dewan Penguji**

Prof. Dr. Suprpto, M. Ag  
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Zacudin Amrullah, MA  
(Sekretaris Sidang)

Azwandi, M. Hum  
(Penguji I)

Novia Suhastini, M.Si  
(Penguji II)



## MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan



Perpustakaan UIN Mataram

dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Qs. An-Nahl : 97)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung,:CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 378.

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk mamaku Suwarti, papaku Rifaid, Kakakku Eka Puji Rahayu, Ryan Aryanto, Adikku Agus Saputra Ramadhan, dan Nada Indah. Almamaterku, semua guru, dan dosenku.



Perpustakaan **UIN Mataram**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Bapak Prof. Dr. Suprpto, M. Ag sebagai pembimbing I dan bapak Zaenudin Amrullah, M.A selaku pembimbing II yang memberikan waktu untuk bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menjadikan skripsi ini lebih terarah dan cepat selesai
2. Bapak Dr. Muchammadun, MPS., M.APP.LING (Adv) selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi.
3. Bapak Dr. Muhammad Saleh, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
6. Untuk kedua orang tuaku, papaku Rifaid dan mamaku Suwarti yang selalu meyakini kepadaku bahwa semua manusia punya keinginan, butuh rencana dalam sebuah rencana butuh strategi, harus menyatukan visi dan misi.  
Melewati sebuah cobaan dan ujian itu adalah sebuah proses perjalanan dimana dari sebuah proses akan ada yang namanya sabar dimana dari sabar akan ada sebuah hasil, jika dilakukan dengan benar maka hasil yang diperoleh juga sesuai dengan harapan. Dimana dari sebuah proses itu lebih penting dari pada hasil.
7. Kakakku Eka Puji Rahayu, Ryan Aryanto, Adikku Agus Saputra Ramadhan, dan Nada Indah. Terimakasih ku ucapkan kepada Allah SWT, karna sudah menghadirkan saudara-saunda yang baik dalam kehidupanku, terimakasih karna kalian saya menjadi wanita yang tangguh dalam segala hal menjalani proses sampai pada titik ini, suka duka sudah saya lalui sendiri sehingga menjadikan saya seseorang yang lebih baik disetiap harinya.
8. Para narasumber, Ibu Rumah Tangga Pemulung, dan Dinas Sosial Kota Mataram yang telah meluangkan waktu memberi informasi, maupun data-data demi kepentingan penyusunan skripsi.
9. Semua pihak tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih

Mataram, 6 Des, 2022

Novitasari  
190302093



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL .....ii**

**HALAMAN LOGO ....iii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING v**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

**PERNYATAAN KEAKSILIAN SKRIPSI**

**PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ....vii**

**HALAMAN MOTTO ii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN x**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI i**

**DAFTAR GAMBAR xv**

**DAFTAR TABEL ....xvi**

**ABSTRAK ii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat

.....5

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

E. Telaah Pustaka

F. Kerangka Teori

G. Metode Penelitian

H. Sistematika Pembahasan

**BAB II PAPARAN DATA TEMUAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Sosial Kota Mataram

2. Letak Geografis

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram

4. Identitas Kantor Dinas Sosial Kota Mataram

5. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Mataram

6. Profil Kepala Dinas

33

7. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial di Indonesia

35

8. Data Jumlah dan Jenis PMKS Pemulung

9. Data Jumlah Bantuan Pendidikan dan Keterampilan

Pemulung dan Permakanan Ibu Rumah Tangga Pemulung



**Perpustakaan UIN Mataram**

10. Gambaran Kondisi Para Pemulung .....38

- B. Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota

Mataram ..43 Perencanaan

1. Pendataan

2. Pemberian bantuan 48

- a. Bantuan program keluarga harapan (PKH) ....50  
b. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Para Pemulung . .56  
c. Bantuan Perumahan Bagi EKS

- C. Faktor penghambat dinas sosial kota mataram dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung di kelurahan jempong baru kota mataram

1. Faktor penghambat

- a. Internal

- b. Eksternal

**BAB III PEMBAHASAN**

- A. Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru Kota

Mataram

1. Perencanaan

2. Pendataan

.....71

3. pemberian bantuan .71

- B. Faktor Penghambat

Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram .....	72
1. Faktor Internal	
a. Kurangnya Anggaran	
b. Kurangnya SDM	
2. Faktor Eksternal .74	
a. Perencanaan	
b. Pendataan	
c. Kurangnya Anggaran d. Kurangnya Konsolidasi	....75

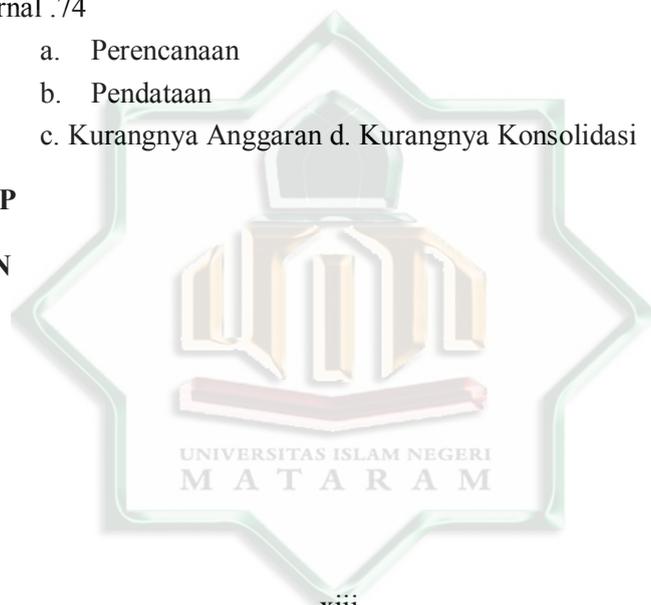
**BAB IV PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

**B.  
SARAN**

**DAFTAR  
PUSTAKA**

....77



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Perpustakaan UIN Mataram**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Daftar Instrumen Pertanyaan Untuk Ibu Rumah Tangga Pemulung

Tabel 2.2 Daftar Instrumen Pertanyaan Untuk Dinas Sosial Kota Mataram

Tabel 2.3 Daftar Instrumen Pertanyaan Untuk Bantuan PKH

Tabel 2.4 Daftar Instrumen Pertanyaan Untuk Bantuan Permakanan



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram .....31



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Penelitian di Lapangan

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 5: Sertifikat Plagiasi



Perpustakaan **UIN Mataram**

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN**

**KESEJAHTERAAN IBU RUMAH TANGGA PEMULUNG  
DI KELURAHAN JEMPONG BARU KOTA MATARAM**

**Oleh:**

**Novitasari**

**NIM 190302093**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. Adanya instansi Dinas Sosial yang di kelola baik dan melayani dengan tepat, cepat, tanpa biaya, untuk terwujudnya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat tergolong tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan Dinas Sosial Kota Mataram merupakan salah satu Instansi dibawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan di urusan rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial dengan pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Dinas Sosial Kota Mataram memanfaatkan dana yang sudah terkumpul untuk menyalurkan bantuan kepada ibu rumah tangga pemulung yang sudah dikategorikan sebagai penerima manfaat, melalui bantuan dan Program mensejahterakan ibu rumah tangga pemulung yang ada di Dinas Sosial Kota Mataram melalui: (1) Peran Dinas Sosial kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram yaitu: perencanaan, pendataan, pemberian bantuan (PKH, Pendidikan pelatihan bagi pemulung, dan permakanan). (2) Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung yaitu: Faktor internal adalah kurangnya anggaran, anggota pendamping khusus program pemulung, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia). Adanya faktor penghambat eksternal adalah perencanaan, pendataan, kurangnya anggaran, kurangnya konsolidasi.

**Kata Kunci:** Dinas Sosial, Kesejahteraan perempuan, Ibu Rumah Tangga Pemulung.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara kepulauan yang berpendapat menengah dan masih dikategorikan negara berkembang. Setiap negara mempunyai tekad untuk lebih maju, menumbuhkan peningkatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah pembangunan banyak hal yang dihadapi oleh negara-negara berkembang tentunya, proses pembangunan berlangsung juga mempunyai sisi positif dan negatif, sehingga sulit untuk dipisahkan dalam pembangunan. Hal ini diperlukan pengembangan terhadap dampak positif agar dampak negatif berkurang. Selain itu, masalah kemiskinan juga terus menjadi beban besar sepanjang sejarah Indonesia. Kondisi ini merupakan sebuah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat

dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup>

Kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian pada beberapa tahun terakhir ini dan yang paling meningkat yaitu pusat perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Perhatian terhadap kesejahteraan sosial merupakan hal utama karena keberadaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat berarti.

Dimana masyarakat memiliki peranan strategis dalam mengembang tanggung jawab dalam pembangunan bangsa.<sup>3</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Selama ini berbagai masalah sosial utamanya kemiskinan tidak kunjung dapat diatasi, atau paling tidak dikurangi. Tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, masyarakat hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan

<sup>2</sup>A. Ramdhani & M. Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal Publik, Vol. 11, No. 01.

<sup>3</sup>TNgutra, “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar” (Skripsi Universitas Negeri Makassar, 2017), hlm. 1.

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>4</sup>

Menjadi pemulung sebenarnya bukanlah suatu profesi yang menjadi pilihan utama atau yang diharapkan oleh sebagian masyarakat, hanya saja pekerjaan sebagai pemulung merupakan pilihan terakhir bagi masyarakat karena sulitnya lapangan dan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat berprofesi sebagai pemulung diantaranya: faktor pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat dan begitu juga dengan masyarakat yang memilih profesi sebagai pemulung. Mereka hanya bisa mengenyam pendidikan dasar bahkan ada yang tidak tamat. Rendahnya pendidikan yang mereka miliki sehingga memaksa mereka menjadi pemulung, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab masyarakat memilih bekerja sebagai pemulung. Lemahnya ekonomi masyarakat pemulung memaksa mereka berkerja sebagai pemulung, hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi mereka semakin hari semakin mendesak dan mengharuskan mereka untuk mendapatkan uang demi kelangsungan hidup mereka. Ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, membuat kelompok pemulung atau masyarakat marginal dan terpinggirkan tidak dapat menikmati hasil pembangunan sekarang ini sehingga para pemulung harus menjalani kehidupan sedemikian rupa.<sup>5</sup>

Permasalahan Pemulung merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan (kota-kota besar). Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan masalah Pemulung adalah kemiskinan, dimana kemiskinan ini berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut. Disamping itu, sulit dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyak diantaranya yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi pemulung.

Masyarakat pemulung sangat mengharapkan untuk dapat hidup lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Namun pada kenyataannya pemulung tidak dapat meningkatkan harapan kesejahteraannya bagi keluarga mereka, dan tetap hidup dalam kemiskinan dan walaupun mereka mampu bertahan dalam kehidupan dengan kondisi sangat memprihatinkan. Sehingga hidup mereka sangat tergantung pada pengepul.<sup>6</sup>

Berbagai program dan kebijakan dalam penanganan kemiskinan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat dari daerah masih belum menemukan cara tepat untuk mengatasinya, baik dalam kendala maupun sistem yang kurang

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Mataram, n.d.

<sup>5</sup> Ramlafatma, “Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembungan Akhir (TPA) Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 5, No. 4, November 2021

<sup>6</sup> Dideng Kadir, *Formasi Sosial Pemulung Potret Keterbelakangan Dalam Pembangunan* (Surakarta: Oase Pustaka, 2016), hlm. 6.

tepat dalam objek penanganan. Sudah banyak program yang telah ada tetapi belum menyentuh akar dari permasalahan ini. Karena dilihat dari pemberdayaan orang tidak mampu untuk mengeskapes sistem sumber yang tersedia. program yang selama ini lebih berorientasi kepada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang

belum tepat sasaran, terbukti ketika ada program pemberdayaan yang dilakukan dari nasional maupun pemberdayaan yang dibuat dalam tingkat daerah maupun dari pusat.<sup>7</sup>

Pelayanan Kelembagaan (a) Pelayanan ini dilakukan oleh berbagai kelembagaan berdasarkan visi dan misi mereka. Kelembagaan yang dimaksud adalah Organisasi Sosial/LSM/yayasan, perusahaan-perusahaan (sebagai wujud tanggung jawab sosial dunia usaha), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. (b.) Jenis pelayanan yang berbasis kelembagaan ini dapat berupa sumber pendanaan bagi masyarakat miskin, atau pelaksana pelayanan itu sendiri. (c.) Berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelayanan untuk anak-anak terlantar dapat mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Kedua, Pelayanan Masyarakat pemulung ini dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang telah tumbuh di masyarakat. Pelayanan sosial ini juga dilakukan oleh berbagai lembaga di luar masyarakat sebagai pendukung dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa kemiskinan yang di Kota Mataram merupakan salah satu permasalahan sosial yang menuntut perhatian pemerintah Kota Mataram Berdasarkan data yang di dapatakan pada tahun 2018 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, penduduk miskin di Kota Mataram berjumlah 62,77 ribu jiwa.

<sup>8</sup>Dibandingkan dengan permasalahan sosial yang lain, masalah kemiskinan ini merupakan permasalahan sosial yang paling menonjol. Selain populasinya yang menonjol, kemiskinan ini telah melahirkan permasalahan sosial baru, seperti pemulung yang dapat peneliti lihat bahwa di kota mataram ini sendiri ada beberapa tempat yang sering didatangi oleh pemulung salah satunya di kelurahan jempong baru kota mataram. Sebagian besar perempuan pemulung memiliki peran ganda dimana perempuan pemulung ini juga berperan sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus keluarganya dan selalu mencari penghasilan sebagai perempuan pemulung.

Kasus kemiskinan pada Kota Mataram bukan merupakan kasus yang baru lagi, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang mendasar di bahas oleh negara begitu juga pemerintah daerah. Angka kemiskinan di Kota Mataram memang tidak begitu berbeda jumlahnya tiap tahun karena hal ini disebabkan oleh

<sup>7</sup> Andi Muhammad Arif Haris, "Pengenalan Masalah Fakir Miskin Di Kelurahan Binong Kecamatan Batunggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat" 2, No. 1 (2019): 1–10.

<sup>8</sup> Nurmi Pemulung. Observasi, 20 November 2022

berbagai faktor, disinilah peran Dinas Sosial Kota Mataram untuk membahas persoalan kemiskinan tersebut.

Melihat masih tingginya angka kemiskinan (Masyarakat pemulung) di Kota Mataram, tentunya dibutuhkan sebuah peran dari lembaga pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Mataram untuk berupaya menekan angka kemiskinan Masyarakat pemulung) melalui berbagai macam program kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Dinas Sosial Kota Mataram sebagai instansi yang memberikan berbagai bantuan dan program kesejahteraan bagi masyarakat sebagai perwujudan visi yaitu tercapainya kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua elemen masyarakat. Dengan adanya visi tersebut Dinas Sosial Kota Mataram dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kota Mataram.

Aktivitas ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru dimulai dari pukul 5-9 istirahat dan lanjut pada pukul 2-5 untuk mencari barang bekas seperti botol, kardus, dan besi. Menjadi pemulung bukannya pilihan akan tetapi untuk menyambung hidup yang berkelanjutan bersama suami dan tentu membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak-anak. Perempuan memiliki peran ganda dimana perempuan bekerja sebagai pemulung berperan sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga dan mencari penghasilan sebagai pemulung inilah yang terjadi di Kota Mataram terkhususnya di Kelurahan Jempong Baru terdapat perempuan yang bertahan hidup, dan bahkan menghidupi keluarganya.

PERDA (Peraturan Daerah) Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 38 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Sosial Kota Mataram dan melaksanakan PERDA (Peraturan Daerah PERD) No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) pasal 5 sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu: PMKS, meliputi pemulung dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>9</sup>

Dinas Sosial Kota Mataram dalam menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemulung dan pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial Kota Mataram berhasil menjalankan program bantuan dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya. Dinas Sosial Kota Mataram terletak di Jl. R.A.Kartini No.3, Monjok Timur, Kecamatan Selaparan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

83122.

<sup>9</sup> Indonesia (24), Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 11 Tahun 2009, LN.2009/No.12, TLN No.4967, LL SETNEG: 32HLM.

Rata-rata permasalahan yang melatar belakangi seseorang menjadi seorang pemulung yaitu: (1) Tingkat pendidikan yang rendah. (2) Terlahir dari keluarga tidak mampu. (3) keterbatasan pada keterampilan. (4) keterbatasan modal menghambat untuk membangun usaha. Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyakit Sosial merupakan pengurus pemulung dengan upaya kesejahteraan yang dilakukan terdapat beberapa komponen kesejahteraan yang dilakukan Dinas Sosial pada Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial diantaranya pada komponen yaitu: perencanaan, pendataan, pemberian bantuan (PKH, Pendidikan pelatihan usaha untuk pemulung, dan permakanan) untuk mendapatkan bantuan tersebut tentu mempunyai beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan di Dinas Sosial Kota Mataram, dan ada manfaat peningkatan kesejahteraan pemulung melalui program yang dijalankan yaitu dalam pendidikan pelatihan usaha

pemulung selesai melakukan pelatihan sesuai keahlian seperti menjahit, perbengkelan akan diberikan mesin jahit dan kompresor karena sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, dan pada program permakanan sudah memenuhi kebutuhan walaupun 2 kali dalam 1 tahun.

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa hadirnya instansi Dinas Sosial Kota Mataram dapat memenuhi kebutuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Instansi Dinas Sosial Kota Mataram mempunyai peran dalam mensejahterakan masyarakat pemulung yaitu perencanaan, pendataan, pemberian bantuan (PKH, Pendidikan pelatihan usaha para pemulung, dan permakanan) yang berkoordinasi dengan instansi lainnya. Bantuan tersebut diatas akan disalurkan kepada pemulung yang berhak mendapatkan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada Dinas Sosial pada Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

Berdasarkan penjelasan ini, suatu hal menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan mengangkat judul penelitian, ***“Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram”***. Fokus penelitian pada Ibu Rumah Tangga Pemulung, dan

Dinas Sosial Kota Mataram.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram?
2. Apa faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong baru Kota Mataram?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Mendeskripsikan Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram?
- b. Untuk mengetahui apa faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong baru Kota Mataram?

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan gambaran bagaimana peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan dan

apa faktor penghambat Dinas

Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan.

### b. Manfaat Praktis

Penulisan ini mempunyai manfaat besar dalam rangka mengetahui secara lebih dalam bagaimana pencapaian mensejahterakan masyarakat dalam proses pelaksanaan kesejahteraan dan apa faktor penghambat hadapi dalam mensejahterakan, dan hasil peneliti ini juga dapat membantu Dinas Sosial Kota Mataram untuk bisa lebih berkembang, dapat dipercaya oleh kementerian sosial, hingga terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Serta bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjunya yang mengambil pokok pembahasan, dan untuk menjadi pelengkap dari kekurangan dalam penelitian ini.

## D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

### 1. Ruang Lingkup

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tertera dalam fokus penelitian di atas. Dimana peneliti akan membahas dan mengkaji secara mendalam mengenai Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung.

Termaksud juga yang akan dijelaskan dan paparkan mengenai perencanaan, pendataan, bantuan, program, perencanaan, pendataan, bantuan, program, Dinas Sosial Kota Mataram

### 2. Setting Penelitian

Setting

penelitian

dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan

Jempong Baru Kota Mataram dan Dinas Sosial Kota Mataram. Dalam mensejahterakan masyarakat pemulung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram sudah berjalan beberapa tahun belakang ini.

## E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang memiliki referensi untuk menghindari duplikasi serta menjamin keaslian dari penelitian ini, keabsahan penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka atau berisi pembahasan tentang teori- teori yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah di ajukan, sudut pandang yang menjadi objek kajian ini adalah Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung. Ada beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang membahas masalah peran instansi pemerintah dan kesejahteraan pemulung.

### 1. Rismayanti, Bahtiar, Bakri: Strategi Pemerintah Kota Kendari Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pemulung, 236 Vol 2, No.1, Juni 2021. Penelitian ini bertujuan yaitu: 1). Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Kendari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pemulung Di TPA Puuwatu Kota Kendari, 2). Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Pemulung Di TPA Puuwatu Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan cara Purposive Sampling dan informan penelitian dalam penelitian ini yaitu pengelola TPA, dan pemulung. Adapun jenis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pengamatan, wawancara, dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kota kendari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemulung, adapun strategi pemerintah Kota Kendari yaitu, pembangunan rumah layak huni, memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan (pemulung), dan pemanfaatan gas metan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pemulung yaitu, keterbatasan alat/fasilitas, kurangnya anggaran/dana dari pemerintah, dan kurangnya keterampilan pemulung.<sup>10</sup>

### 2. Fauziah Lamaya, Amir Syarifudin Kiwang: Studi Pemberdayaan Perempuan

(Pemulung) Rawan Sosial Ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang, 222 Vol. 10 No. 1 2022. Pemberdayaan dapat dikatan sebagai suatu cara atau proses dalam meyiapkan mutu ADM dengan tujuan agar ADM yang ada akan menjadi mandiri dan memiliki jaringan kerja yang lebih luas serta dan dapat menyelesaikan dengan kondisi zaman saat ini.

Pemberdayaan dapat menjadikan perempuan lebih berkembang dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Akan tetapi dalam ha ini banyak perempuan yang belum mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit bagi mereka untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi

<sup>10</sup>Rismayanti, Bahtair, Bakri, "Strategi Pemerintah Kota Kendari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prmulung" *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 236 (Vol 2/No.1/Juni 2021).

dalam kehidupannya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kondisi wanita rawan sosial ekonomi yang berada di TPA kelurahan II.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Peneliti akan mengambil tempat penelitian di Kota Kupang khususnya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Manulai II. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena tempat ini terdapat masalah sosial dan adanya wanita rawan sosial ekonomi. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumen, kemudian teknik analisis datanya menggunakan data *Reduction* (reduksi data), data *display*, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di TPA Manulai II Kota Kupang belum bisa berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat dikarenakan kendala dana, identitas kependudukan, serta mental instan (gampang) dari pada penghuni TPA Manulai II. Kedepan baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya masyarakat perlu menyiapkan secara baik program pemberdayaan dan semua harus dilakukan secara terstruktur dan teratur, mulai dari pendataan, sosialisasi, pelaksanaan program, sampai pada tahap evaluasi dan *follow up*.<sup>11</sup>

3. Siti Nur Fitriyani dan Tri Ahmad Faridh: Intervensi Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Pada Kelompok Marginal

Piyungan Yogyakarta, Vol. 7, No. 1, 2021 (74-99). Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah telah melaksanakan intervensi untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup para kaum marginas, yakni pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dengan menerapkan dua model intervensi komunitas, yakni model pengembangan masyarakat lokal, dan model perencanaan sosial.

Kajian ini hendak menggambarkan keterkaitan antaran komponen model intervensi komunitas dalam merealisasikan kombinasi model-model intervensi komunitas yang diterapkan sebagai usaha perbaikan kesejahteraan kelompok marginal tersebut. Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Uraian komponen model intervensi akan dideskripsikan dalam komponen model intervensi yang dikembangkan oleh Jack Rothman dan kawan-kawan. Hasil kajian menggambarkan bahwa kombinasi kedua model intervensi diselenggarakan karena tuntutan struktur dan masalah yang ada juga mencerminkan kebutuhan lahirnya dua model intervensi tersebut, sehingga terjadi sinergi tujuan model-model intervensi yang diterapkan. Tentu dengan demikian, menjadi komponen strategi dasar, taktik dan teknik perubahan yang diterapkan juga akan terhubung pada tujuan-tujuan tersebut. Selain ini terjadi pemanfaatan komponen intervensi secara lebih efisien, karena dapat menunjang penerapan model-model

<sup>11</sup>Fauziah Lamaya, Amir Syarifudin Kiwang, "Studi Pemberdayaan Perempuan (Pemulung)" *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 222 Vol. 10 No. 1 2022

intervensi secara sekaligus.<sup>12</sup>

4. Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad alfian, yang berjudul “Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar yang dapat di ketahui dengan menggunakan 2 aspek yaitu pembinaan secara individual atau terhadap SDM Pemulung dan pengembangan ekonomi atau sumber pendapatan pemulung di TPA Tamangapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Antang Kota Makassar. 1) Proses pemberdayaan pemulung pemulung di TPA Tamangapa Kota Makassar adalah sebagai berikut a. Peran Format sebagai Community Based Development yakni melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membentuk suatu kelompok yang bertujuan meningkatkan kapasitas SDM pemulung itu sendiri dalam pengetahuan tentang metode pengelolaan sampah yang mereka kumpulkan menjadi bernilai ekonomi. Selain itu komunitas ini adalah berupaya membangun kesadaran pemulung agar dapat hidup mandiri terutama menghadapi problem kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan pada komunitas pemulung di TPA Tamangapa dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum layak baik itu pangan, pakaian, papan, kesehatan dan pendidikan. b. Kegiatan pemulung di TPA Tamangapa adalah para pemulung mengumpulkan sampah secara individu maupun kelompok yang telah di bongkar truk sampah. Para relawan format memberikan bimbingan khusus kepada pemulung dalam pengelolaan sampah yang mereka kumpulkan sehingga jenis barang yang mereka kumpulkan dapat bernilai tinggi. 2) Faktor Pendukung Pemberdayaan Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar adalah terlaksananya pemberdayaan pemulung berbasis swadaya masyarakat atau disebut *Community Based Development* (CBD).<sup>13</sup>

## F. Kerangka Teori

<sup>12</sup>Siti Nur Fitriyani dan Tri Ahmad Faridh, “Intervensi Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Pada Kelompok Marginal Piyungan Yogyakarta” *Jurnal Studi Agama- Agama*, Vol. 7, No. 1, 2021 (74-99)

<sup>13</sup>

Alfian Muhammad, “Pemberdayaan Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Tamangapa Antang Kota Makassar,” *Skripsi* (Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

## 1. Peran

### a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dilakukan.<sup>14</sup> Peran didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan atau dimainkan oleh seseorang yang memegang posisi atau status sosial dalam suatu organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat perilaku dianggap sebagai milik orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan "role" definisinya adalah "duties or obligations of a person in business". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu perusahaan atau kerja". Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peran kejadian.<sup>15</sup>

Peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dipenuhi oleh lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu keputusan yang membentuk fungsi dari pengaturan. Ada dua jenis golongan yaitu golongan itu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Di dalam menjalankan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat berarti perilaku individu memutuskan posisi tertentu, maka konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/kedudukan tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi Peran merupakan kompleks harapan manusia terhadap sikapnya Individu harus bersikap dan bertindak berdasarkan situasi tertentu status dan fungsi sosial.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melakukan sesuatu peran.<sup>16</sup> Peran adalah aspek dinamis dari fungsi (status). Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi maka dia memenuhi peran. Sedangkan kewajiban adalah semua yang harus dilakukan orang dalam menjalankan hidupnya. Di kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian.

Kemudian upaya yang harus dilakukan wanita di zaman sekarang ini reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah harus mendapatkan momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat daerah maupun nasional berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, bulat dan lonjong demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selama ini lebih banyak

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>15</sup>Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.86.

<sup>16</sup>Nuruni dan Kustini, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00

ditentukan oleh orang lain, sedangkan perempuan menanggung akibatnya sendirian yang tidak menguntungkan.<sup>17</sup>

Optimalisasi untuk membangun masyarakat sipil, dengan memperjuangkannya ruang publik sebagai wadah bagi seluruh warga Negara mengembangkan kompetensinya memberikan peluang dan kesempatan bagi pemenuhan kebutuhan, sehingga perempuan dapat mencapai aktualisasi diri, Ini semuanya dapat diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kesadaran bersama menyanggah mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan.

Dari sebagian pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu, Dan keberadaan wanita yang bisa dipahami oleh berbagai pihak, dimana peran perempuan tentunya tidak dilupakan keluarga, seperti peran istri, bantuan suami, kontrol atas keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, blok bangunan pertama dari sebuah keluarga serta hati yang penuh cinta dan kasih saying beristirahat sebagai anggota masyarakat.

#### b. Jenis- Jenis Peran

Peran atau Role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki jenis yang berbeda-beda adalah:<sup>18</sup>

1. Peran nyata (Enacted Role) adalah cara yang benar-benar dilakukan seseorang atau sekelompok orang ketika melakukan suatu peran.
2. Peran yang direkomendasikan (prescribed role) adalah cara yang diharapkan masyarakat jauh dari kita dalam melakukan peran tertentu.
3. Konflik peran (Role Conflict) merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang yang memegang satu atau lebih status yang membutuhkan harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan.
4. Kesenjangan Peran (Role distance), yaitu pemenuhan peran dengan cara tertentu emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang untuk memenuhi peran tertentu.
6. Model Peran (role model) adalah seseorang yang perilakunya kita, misalnya: meniru, mengikuti.
7. Himpunan atau ruang lingkup peran (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan orang lain pada dirinya melakukan perannya.

Dari berbagai jenis peran di atas, penulis menggunakan jenis peran nyata Enacted Role adalah cara yang benar-benar dilakukan seseorang atau sekelompok orang ketika melakukan suatu peran.

<sup>17</sup>Ulfiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 50

<sup>18</sup>Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992, Hal 25

## 2. Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Mataram adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial yang merupakan Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Sebelumnya bernama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah dibantu dengan alat-alat negara. Dalam hal pemulung ini, pemerintah dibantu oleh pemerintah daerah yang juga dibantu oleh Dinas sosial. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial.

### 1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Secara yuridis formal keberadaan Dinas Sosial diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a) Memfasilitasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- b) Mendinamisasikan dan memperkuat sistem sumber pelayanan dan potensi kesejahteraan sosial.
- c) Memberdayakan individu atau kelompok penyandang masalah sosial.
- d) Melaksanakan advokasi sosial untuk memungkinkan terjadinya kesempatan yang sama diantara semua warga negara dalam memanfaatkan sumber-sumber pelayanan.

Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugasnya, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengelolaan usaha kesejahteraan sosial.
- b) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif, dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- c) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan usaha-usaha kesejahteraan social secara terpadu dan berkelanjutan.
- d) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bimbingan, dan pengendalian di bidang kesejahteraan social.
- e) Pelaksanaan kebijakan bimbingan, pelayanan dan bantuan sosial serta kegiatan rehabilitasi sosial.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas ketata-laksanaan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang

mempunyai ketrampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Tugas dari pekerja sosial sesuai pasal 34 huruf b Undang-Undang No. 3 tahun 1997 adalah membimbing, membantu, dan mengawasi.

Berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya itu. Pekerja sosial (pasal 35 Undang-undang no. 3 tahun 1997) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela.

Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988). Oleh karena itu jabatan pekerja Sosial adalah jabatan fungsional dan hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Pekerja Sosial adalah melaksanakan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial, baik bersifat pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial, dengan mengindahkan kebijaksanaan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas itu Pekerja Sosial berfungsi sebagai:

1. Motivator

Yaitu memberi informasi, sugesti, dan dorongan kepada seseorang keluarga maupun masyarakat sehingga berkemauan, bersemangat, dan bertekad mencegah dan menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial.

2. Dinamisator

Yaitu mengerahkan, menggerakkan seseorang keluarga ataupun masyarakat sehingga berkemampuan mengenai dan mendayagunakan secara swadaya semua sumber dan potensi kesejahteraan sosial untuk sebesar-besarnya mencapai kesejahteraan sosial.

3. Pelaksana

Yaitu pelaksana tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan

social pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam melaksanakan fungsinya itu, setiap Pekerja Sosial menerapkan prinsip-prinsip Pekerja Sosial yang sesuai dengan nilai dan norma kepribadian bangsa. Setiap pelaksanaan fungsi secara perorangan maupun kelompok diselenggarakan secara melembaga dan terorganisasikan serta terpolo dalam kesatuan sistem pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

2. Jenis-Jenis PMKS

Adapun jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dinaungi oleh Dinas Sosial, antara lain:

Anak balita terlantar, Anak terlantar, Anak nakal, Anak jalanan.

- a) Wanita rawan sosial ekonomi, Wanita yang menjadi korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah.
- b) Lanjut usia terlantar, Lanjut usia yang menjadi korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah.
- c) Penyandang cacat, Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, Tuna Susila.
- d) Pengemis, Gelandangan, Gelandangan psikotik, Pemulung.
- e) Bekas Narapidana, Korban penyalahgunaan napza, f) Keluarga fakir miskin, Keluarga berumah tak layak huni, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga rentan.
- g) Komunitas adat terpencil, Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, Korban bencana alam, Korban bencana sosial/pengungsi, h) Pekerja migran terlantar, dan Pengidap HIV/AIDS 3. Program Dinas Sosial

Pemerintah Daerah Kota Mataram mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Mataram Dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Mataram mengenai sandang, pangan, papan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram melakukan berbagai cara dan inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Program Unggulan Dinas Sosial Kota Mataram yaitu:

- a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- c) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma
- d) Program pembinaan panti Asuhan/Panti Jompo
- e) Program Pembinaan dan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- f) Program Pembinaan Keagamaan

Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai objek pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan RASKIN (Beras Miskin Untuk Rumah tangga miskin perkecamatan sekabupaten Gowa), PKH (Program Keluarga Harapan), dan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Berangkat dari indikator Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin diatur dalam Peraturan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Mataram, mencakup perencanaan, pendataan dan pemberian bantuan.



**Perpustakaan UIN Mataram**

Pemberdayaan masyarakat miskin (Pemulung) dapat dilihat melalui program-program yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan (Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Mataram) terdiri atas:<sup>19</sup>

### 3. Indikator Kesejahteraan

#### a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>20</sup>

Menurut KBBI, kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Husna, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>22</sup>

Kesejahteraan juga merupakan perasaan aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan. Kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera atau terpenuhinya segala kebutuhan hidup, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak merasa kekurangan atau berada dalam kecemasan diakrnanakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang dibutuhkan sudah terpenuhi.<sup>23</sup>

Menurut Adi, kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.<sup>24</sup> Kesejahteraan Sosial menurut Sumarnonugroho adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu fungsi terorganisasi adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Mataram.

<sup>20</sup> Lusya Vivi Gorale, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe" *Jurnal Folume 1 No. 1 Tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 6 (2021): 2337-5736

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Cetak III (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 572.

<sup>22</sup> Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 23 (2014): 45-58.

<sup>23</sup> Mawardi dan Nur Hidyati, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pusataka Setia, 2002, hlm. 217).

<sup>24</sup> M Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm 16.

menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi- kondisi.<sup>25</sup>

Pengertian kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung 4 (empat) makna, seperti dikutip yaitu:

1. Sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materil dan non materil. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi.
2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.
3. Sebagai tunjangan sosial, diberikan kepada orang yang tidak mampu, karena sebagian besar penerima manfaat adalah orang- orang miskin, cacat, penganggur. Keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, dan ketergantungan.
4. Sebagai proses atau usaha terencana. Yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan- badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.<sup>26</sup>

#### b. Indikator Kesejahteraan Sosial

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.

Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel), serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asuransi sosial, jaring pengaman sosial, dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh program pembangunan kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Mohammad Suud, 3 *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: aparestasi Pustaka Publhiser, 2006. Hlm. 22-23.

<sup>26</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, hlm. 104.

<sup>27</sup> Triono, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Pusaran Desentralisasi Dan Good Governances," *Jurnal Tapis* 7, no. 2 (2011): 30-45.

Di negara-negara maju, terutama yang menganut ideologi “kesejahteraan negara” (*welfare state*), Secara harafiah, terjemahan bebas *welfare state* adalah “negara kesejahteraan”. Namun, karena sistem ini substansinya menunjuk pada pentingnya peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka lebih tepat jika *welfare state* diterjemahkan “kesejahteraan negara”. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud dari kewajiban negara (*state obligation*) dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia, meskipun konstitusinya secara *de jure* (legal-formal) merujuk pada sistem kesejahteraan negara, implementasi dari pembelaan negara terhadap hak-hak fakir miskin, anak telantar dan penyelenggaraan jaminan sosial masih dihadapkan beragam tantangan

### c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin menurut teori dikutip, terdiri atas:

#### 1. Faktor pendukung

##### a) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

##### b) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi- organisasi yang kompleks dan tersebar luas.<sup>28</sup>

Faktor penghambat

<sup>28</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 90-92.

a) Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak berjalan efektif.

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

#### 4. Ibu Rumah Tangga Pemulung

a. Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005) pengertian ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang mengurus keluarga saja. Menurut Joan, menjelaskan pengertian ibu rumah tangga sebagai wanita yang telah menikah dan menjalankan tanggung jawab mengurus kebutuhan-kebutuhan di rumah. Sedangkan menurut pendapat Walker dan Thompson ibu rumah tangga adalah wanita yang telah menikah dan tidak bekerja, menghabiskan sebagian waktunya untuk mengurus rumah tangga dan mau tidak mau setiap hari akan menjumpai suasana yang sama serta tugas-tugas rutin. Menurut Fredian dan Maule masyarakat tradisional memandang fungsi utama wanita dalam keluarga adalah membesarkan dan mendidik anak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan secara umum seorang ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang sudah menikah memiliki peran sebagai istri, ibu, dan homemaker (pekerja rumah tangga).<sup>29</sup>

b. Pengertian Pemulung

Secara konseptual pemulung adalah lapisan ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Hal tersebut disebabkan karena pemulung biasanya tidak memiliki rumah yang memadai, penghasilan rendah, sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mencuri, sehingga pemulung termasuk dalam lapangan sosial, ekonomi dan budaya yang paling bawah.<sup>30</sup>

Menurut Sutardji, Pemulung adalah orang yang memungut barang-barang bekas seperti sampah plastik, kardus bekas, kaca dan lainnya untuk

<sup>29</sup> Sudibyo, Agus (2010). "Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban" *Ilmu Sosial dan*

*Ilmu Politik* 14 (1): 23-46. doi:10.22146/jsp.10947.

ISSN 2502-7883

<sup>30</sup> Sutarji, "Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung," *Jurnal Geografi* 6, no. 2 (2022): 121-32.

dijual kepada pengelola barang bekas yang akan dijadikan barang bernilai jual. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan keluarga.<sup>31</sup> Menjadi pemulung bukanlah suatu pekerjaan yang diinginkan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui memulung adalah suatu pekerjaan yang dipandang rendah bahkan keberadaan mereka dianggap mengganggu kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan.

Tetapi di satu sisi pemulung juga memiliki nilai manfaat untuk lingkungan.

Hal ini terbukti bahwa sampah plastik, kaca, prabot yang ditumpuk di rumah terkadang dibuang sembarangan bahkan dapat merusak lingkungan.

Di sinilah nilai kebaikan yang ada pada pemulung.

Menurut Twikromo, pemulung adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari mengumpulkan barang bekas. Aktivitas pemulung kota yang cenderung menggunakan modal kecil, mereka mengumpulkan barang-barang bekas (buangan dari tempat-tempat sampah milik rumah tangga, toko, atau restoran). Selain itu biasanya ada beberapa kelompok yang melakukan aktivitas memulungnya ditempat kolektif seperti bak atau pembuangan akhir sampah warga kota. Barang-barang yang dikumpulkan biasanya berupa plastik (botol atau bekas makanan), alumunium, kaleng, tembaga, kardus, pakaian, dan barang lainnya yang dinilai masih berharga.<sup>32</sup>

Menurut Nawardi, pemulung adalah orang yang memungut, mengambil, mengumpulkan dan mencari sampah baik perorangan maupun kelompok yang kemudian dijual kepada pengepul. Pemulung bekerja mengumpulkan barang-barang bekas dengan cara mengerumuni muatan truk sampah yang tengah dibongkar, sebagian pemulung lainnya berputar-putar mengais barang bekas dari tumpukan-tumpukan sampah.<sup>33</sup>

Menurut Mudiyo, dkk, pemulung adalah orang yang mengumpulkan dan memproses sampah di jalan-jalan, sungai-sungai, bak-bak sampah dan lokasi pembuangan akhir sebagai komoditas pasar.<sup>34</sup> c. Jenis-Jenis Pemulung

Almagfira dalam Jefriyanto, mengategorikan pemulung menjadi dua, yaitu: pemulung jalanan dan pemulung menetap. Pemulung jalanan dikategorikan oleh pemerintah sebagai gelandangan. Sedangkan pemulung

<sup>31</sup> Candra Jefriyanto, "Pemulung Di Era Milenial (Studi Kasus Di TPA Jamur Labu, Aceh Timur)," *Jurnal Investasi Islam* 4, no. 1 (2019): 102–15.

<sup>32</sup> Achmad Syakrani, "Studi Tentang Strategi Hidup Pemulung Perempuan Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Bukit Pinang Kota Samarinda," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016): 181–93.

<sup>33</sup> Siti Huzaemah, "Sampah Adalah Berkah; Studi Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan," *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 1 (2020): 81–92.

<sup>34</sup> Mudiyo, dkk, *Dimensi-Dimensi Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: APMD Press, 2005), hlm. 135.

menetap adalah pemulung yang secara bersama-sama menyewa rumah baik itu permanen ataupun non-permanen yang bermukim di TPA.<sup>35</sup> 1) Pemulung sampah menetap

Adalah pemulung sampah yang menetap atau bermukim di gubuk- gubuk kardus, tripleks, seng, terpal, dan lain sebagainya disekitar tempat pembuangan akhir (TPA). Pemulung yang menetap di tempat pembuangan akhir (TPA) terbagi menjadi dua kelompok yaitu pemulung sampah yang menggantungkan hidupnya seratus persen pada kegiatan pemulungan. Sedangkan kelompok yang kedua adalah pemulung sampah yang melaksanakan aktivitas pemulungan setelah mereka panen atau menunggu panen palawija di kampungnya dengan demikian pemulung sampah tersebut memiliki pekerjaan disektor pertanian dan pemulungan.

2) Pemulung sampah tidak menetap

Adalah pemulung sampah yang memungut sampah dari gang, jalanan, tempat pembuangan sementara (TPS), pinggiran sungai, dan sebagainya.<sup>36</sup>

d. Indikator Pemulung

Adapun indikator yang membuat seseorang menjadi pemulung adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Faktor Internal

a. Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi peluang kerja serta semakin tinggi pendapatan yang diperoleh. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa 70% pemulung di Surabaya tidak lulus SD.<sup>38</sup>

b. Untuk Bertahan Hidup

Rata-rata usia pemulung dimulai pada usia 30-40 tahun.

Disamping memenuhi kebutuhan hidup pemulung juga memberikan nafkah untuk keluarganya. Untuk bertahan hidup hampir secara keseluruhan pemulung merupakan imigran dari pedesaan untuk mencari barang-barang bekas di TPA.

2.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal di atas indikator menjadi pemulung didorong oleh beberapa faktor eksternal diantaranya sebagai berikut:

a.

<sup>35</sup> Jefriyanto, "Pemulung Di Era Milenial (Studi Kasus Di TPA Jamur Labu, Aceh Timur)." <sup>36</sup> Y. Argo Twikromo, *Pemulung Jalanan Yogyakarta* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999).

<sup>37</sup> Jefriyanto, "Pemulung Di Era Milenial (Studi Kasus Di TPA Jamur Labu, Aceh Timur)." <sup>38</sup> Sutarji, "Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung."

Terbatasnya pelayanan sosial dasar. b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah serta alat memenuhi kebutuhan hidup. c. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan kurangnya perlindungan usaha-usaha sektor informal. d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit dan tingkat bunga yang tidak mendukung usaha sektor mikro. e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. f.

Sistem distribusi zakat yang masih belum maksimal terealisasi. g.

Minimnya budaya masyarakat terhadap berfikir untuk maju. h. Kondisi geografis yang sulit seperti tandus, rawan bencana, terpencil. i.

Orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek budaya bangsa. j. Pembangunan yang masih belum merata sampai ke pelosok desa.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan fakta atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Cara untuk mencari fakta, peneliti, maupun oleh praktis menggunakan model-model tertentu.<sup>39</sup> Metode merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. "Metode penelitian adalah strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi, sehingga dapat dicari pemecahan masalah dari permasalahan yang dihadapi". Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>40</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis yakni penelitian lapangan yang menggabungkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif.<sup>41</sup>

Pada kajian ini peneliti akan memaparkan mengenai faktor yang melatar belakangi Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. Kemudian menggali informasi secara mendalam mengenai peran, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung di kelurahan jempong baru Kota Mataram.

### 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian berperan sebagai instrument

<sup>39</sup> Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2007), hlm 49

<sup>40</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D", (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3

<sup>41</sup> Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

kunci, karena itu merupakan penentu dari semua proses penelitian di lapangan. Kehadiran peneliti bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta menyakinkan dalam penelitian ini keberadaan peneliti di lapangan diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan, dengan mengajukan surat izin penelitian kepada instansi.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian, tempat penelitian merupakan tempat dilakukannya peneliti untuk mendapatkan data yang sebenarnya tentang fenomena yang akan diteliti. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram dan Dinas Sosial Kota Mataram.

Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian. Data Sekunder yaitu karena beberapa alasan: Pertama, peneliti melihat bahwa kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung masih di bawah standar yang layak dan masih terdapat banyak ibu-ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru yang berprofesi sebagai pemulung.

### 4. Sumber Data

Setiap peneliti memerlukan data dan informan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, agar data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis. Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>42</sup> Adapun sumber data dari penelitian ini, peneliti memperoleh hasil dari observasi, wawancara dengan ibu rumah tangga pemulung, dan Dinas Sosial Kota Mataram:

a.

#### Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan dari sumber pertama melalui observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, kurang dari 20 orang akan menjadi sumber data penelitian.

Inisial nama ibu rumah tangga pemulung yang menjadi sumber informasi untuk melengkapi penelitian ini adalah NI, MN, RH, NJ, NH dan adapun informan pendukung merupakan Pihak Dinas Sosial Kota Mataram.

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari orang atau dokumen lain. Data sekunder mendukung data dari data primer seperti buku, jurnal, tesis atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Amri Amir, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, (Jambi, IPBpress, 2009), hlm 75

<sup>43</sup>Toto Suwarsa, "Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam melakukan penelitian. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Tanpa mengetahui lebih awal cara untuk mengumpulkan data peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data tertentu. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara atau sumber. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, kegiatan, waktu, tujuan, aktivitas, peran, kesejahteraan, perencanaan, kendala, hambatan.<sup>44</sup>

Patton membenarkan bahwa observasi dapat menjadi metode pengumpulan data yang sesuai, terutama dalam penelitian kualitatif, bahkan menjadi metode yang paling mendasar dan paling lama dari ilmu-ilmu sosial dan semua bentuk penelitian psikologi, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif mengandung aspek psikologi serta dapat menjadi sumber data yang paling akurat dan bermanfaat asalkan dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai atau telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap. Latihan-latihan yang dapat diupayakan agar membuat hasil observasi dapat diandalkan yaitu dengan belajar melakukan observasi terhadap peristiwa atau subjek yang dipilih secara khusus, dan berusaha menuliskan hasil observasi secara deskripsi karena sangat sulit membiasakan subyektifitas kita terhadap fakta yang sedang terjadi dan berusaha untuk disiplin mencatat kejadian yang diamati secara lengkap dan detail.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipasi. Dimana kehadiran peneliti akan melakukan 2 pengamatan, (1) Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram (2) Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram.

### b. Wawancara

Menurut Lincoln dan Guba, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

<sup>44</sup> Mamik. Metodologi Kualitatif. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, hlm. 105

<sup>45</sup> Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, Observasi Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2018), hlm. 2.

(*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang dilakukan dengan berbagai pertanyaan yang tidak bergantung terlebih dahulu, namun disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Wawancara tidak terstruktur ini peneliti menggunakan untuk mendapatkan statistik yang benar tentang objek yang akan diteliti, di sisi lain untuk menghindari keterkaitan peneliti pada item yang akan dipelajari dan untuk mendapatkan data.

Wawancara, yaitu cara mendapatkan data dengan cara menelusuri data, dengan menggunakan wawancara bebas terbimbing dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap mengandalkan catatan-catatan terkait pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dalam melakukan wawancara.<sup>47</sup> Adapun macam-macam wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara Terstruktur yaitu teknik pengumpulan data, jika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, pada saat melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan.
- 2) Wawancara Semi Struktur yaitu pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur
- 3) Wawancara Tidak Berstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang ditetapkan secara sistematis dan menyeluruh untuk pengumpulan data.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu yaitu peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai masalah atau permasalahan awal yang ada pada objek, selain itu peneliti tidak mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih mendengarkan apa yang responden katakan. Setelah orang yang akan diwawancarai ditentukan, pewawancara dapat meminta pendapat

<sup>46</sup> Rr. Indah Ria Sulistyarini dan Nur Pratiwi Novianti, Wawancara Sebagai Metode Efektif Untuk Memahami Perilaku Manusia, (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012) hlm 2.

<sup>47</sup> Bambang Rustanto. Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial, (Bandung, PT remaja rosdakarya, 2015). hlm 58.

<sup>48</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, hlm. 320-321

narasumber kapan dan di mana agar orang tersebut merasa nyaman dan fleksibel.<sup>49</sup>

Adapun yang akan diwawancarai adalah Ibu Rumah Tangga Pemulung yaitu NI, MN, RH, NJ, NH dan adapun informan pendukung merupakan dari pihak Dinas Sosial Kota Mataram

Dari berbagai jenis Wawancara di atas, penulis menggunakan jenis Wawancara Tidak Berstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang ditetapkan secara sistematis dan menyeluruh untuk pengumpulan data.

### c. Dokumentasi

Menurut Bambang Rustanto, penelitian dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan tertulis/cetak/rekaman yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.<sup>50</sup>

Dokumen juga merupakan proses melihat kembali sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data yang ditemukan. Sumber data dokumen diambil dari lapangan berupa arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>51</sup>

Menurut

Sugiyono, dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu.

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari seorang individu. Dokumen berupa tulisan, misalnya buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi berupa gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya, seperti karya seni rupa, berupa foto, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>52</sup>

Dokumentasi tersebut memungkinkan peneliti untuk membuktikan kebenaran hasil data yang peneliti ekstrak dari hasil yang diteliti 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan apa yang ditemukan bisa diceritakan kepada orang lain. Menganalisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan keadaan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun keadaan pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat

<sup>49</sup> Wilinny, "Analisis Komunikasi Di Pt. Asuransi Buana Independent Medan," *Jurnal Ilmiah Simatek*, ISSN. 2550-0414 (Vol.3 No.1 Februari 2019)

<sup>50</sup> Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerja Sosial*, (Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, September, 2015), hal. 56.

<sup>51</sup> Bambang Rustanto. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, hlm. 60

<sup>52</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), Hal. 84.

diceritakan kepada orang lain.<sup>53</sup>

#### 1) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu perlu untuk dicatat dengan teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

#### 2) Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang terkandung dalam anotasi lapangan dan transkrip. Dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

##### a) Seleksi

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi mana yang paling penting, hubungan mana yang mungkin penting, dan oleh karena itu informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.<sup>54</sup>

##### b) Pengerucutan

Pada tahap ini, peneliti memfokuskan pada data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Langkah ini merupakan lanjutan dari langkah pemilihan data. Peneliti membatasi data hanya pada rumusan masalah.

##### c)

##### Ringkasan

Langkahnya adalah membuat ringkasan inti, proses, dan klaim yang

perlu dipertahankan agar tetap ada. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, terutama kualitas dan kelengkapan datanya.

#### 3) Penyederhanaan dan Transformasi Data

Data dalam penelitian ini terus disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, termasuk seleksi ketat melalui ringkasan atau deskripsi singkat, analisis tipe data ke dalam skema yang lebih besar dan sebagainya.

Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Adapun yang paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami.

#### 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga penarikan kesimpulan serta verifikasi merupakan upaya pemaknaan data

<sup>53</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 228.

<sup>54</sup>Miles, M.B, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014), Hal. 11.

yang disajikan dengan mencermati masalah melalui hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori serta memaknai data tersebut melalui pola-pola keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan-hubungan lain berupa sebab-akibat.<sup>55</sup>

Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, selalu dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data-data yang akan diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan data yang telah disajikan.

Kemudian data tersebut dianalisis secara induktif, artinya menguraikan peristiwa-peristiwa atau data-data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkannya dalam data yang bersifat umum.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (Validitas) dan keandalan (reliabilitas).<sup>56</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, hal yang digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

##### a. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk lebih validitas data atau informasi yang di peroleh demi keabsahan hasil penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

##### b. Pembahasan dengan Rekan Sejawat

Teknik ini peneliti lakukan dengan cara memaparkan hasil penelitian dengan cara diskusi dengan rekan sejawat, Dosen pembimbing, atau dengan orang yang ahli yang memiliki pengetahuan yang sama dengan hal yang di kaji dalam penelitian ini. Tujuannya menghindari penafsiran yang keluar dari fokus penelitian dan merupakan tambahan wawasan bagi peneliti yang membahas tentang masalah tersebut sesering mungkin.

##### c. Kecukupan Referensi

Kecukupan ini untuk membandingkan data-data yang di peroleh dari bahan catatan kutipan atau sebagainya. Penelitian berusaha untuk menggunakan tehnik ini dengan kemampuan peneliti, yaitu dengan

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal. 332.

<sup>56</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hal. 171.

membandingkan catatan yang satu dengan catatan yang lainnya. Oleh karena itu peneliti selalu berpedoman pada kemuktahiran referensi dengan banyak membaca referensi-referensi yang mendukung.

d. **Tringulasi**

Dalam tringulasi ini, hal yang diinginkan penelitian adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sebanyak-banyaknya dengan pemanfaatan suatu yang lain dari sumber data yang ditentukan. Artinya, penelitian tidak terpaku pada satu atau dua sumber saja.<sup>57</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menentukan gambaran secara terstruktur dan jelas mengenai tata urutan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mencantumkan laporan penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN:**

Pembahasan dalam bab ini terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan Setting Penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, serta rencana jadwal kegiatan penelitian dan daftar pustaka.

2. **BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN:**

Dalam bab ini berisi paparan Profil Dinas Sosial dan Gambaran Kondisi Para Pemulung, pada bab ini data dan temuan penelitian dipaparkan secara keseluruhan.

3. **BAB III PEMBAHASAN:**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan. Peneliti menjelaskan pembahasan sesuai dengan hasil jawaban yang ditemukan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. Kemudian apa faktor penghambat Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram.

4. **BAB IV PENUTUP:**

Pada bab terakhir ini berisi tentang. Kesimpulan dan Saran yang diikuti dengan jawaban dan pertanyaan pada rumusan masalah sekaligus dilanjutkan dengan Daftar Pustaka

<sup>57</sup>SudarwanDanim,*MenjadiPenelitiKualitatif*(Bandung:CV.PustakaSetia,2002),hlm  
29.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Untuk mengetahui dan memperoleh data-data gambaran umum lokasi penelitian, pada bagian ini peneliti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kota Mataram. Lokasi penelitian selanjutnya akan

dijadikan acuan untuk menyajikan data dan hasil selama penelitian.

Data yang disebutkan adalah sebagai berikut:

### **1. Profil Dinas Sosial Kota Mataram**

Dinas Sosial merupakan salah satu Instansi dibawah naungan Kementrian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di rehabilitasi Sosial, dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Penanganan fakir miskin untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara.

Dinas Sosial Kota Mataram adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial yang merupakan peringkat daerah baru yang dibentuk untuk memenuhi peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat daerah dan melaksanakan peraturan daerah kota Mataram Nomor 15 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Mataram Sebelumnya bernama Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.

Latar Belakang Dinas Sosial Kota Mataram, Peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun kesejahteraan Sosial sangat Penting, baik dalam pengurangan segi jumlahnya sebagai penyandang masalah maupun pemberdayaan masyarakat, Serta dalam meningkatkan kemampuan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi setiap keluarganya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat salah satu Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Peran yang Strategis dalam Penanganan masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan

terhadap masyarakat. Kegiatan Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat kegiatan pelayanan dan penanganan yang membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS/ Fakir Miskin.

Dalam rangka menjawab perkembangan sosial politik masyarakat yang terus berjalan dan sesuai dan ketentuan serta kebutuhan di era otonomi daerah, maka dengan mendasarkan pada peraturan walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota

Mataram secara

resmi  
terbentuk  
Dinas  
Sosial  
Kota  
Mataram  
Yang

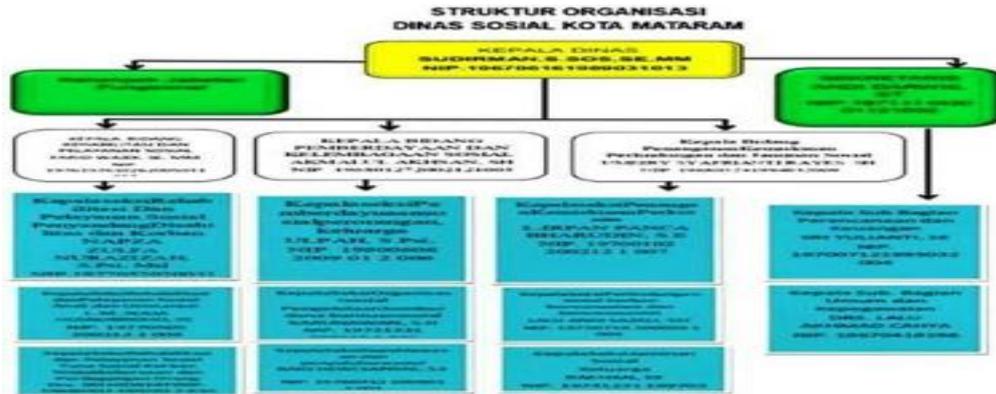
memiliki struktur sebagai berikut:

### **2. Letak Geografis**

Letak Geografis Dinas Sosial Kota Mataram, Terletak di Kota Mataram dimana sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mataram Barat, Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Taliwang, Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Cakranegara dan sebelah selatan dengan kelurahan Cakra Barat.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram**

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram**



Sumber: Dinas Sosial Kota Mataram

Dalam rangka menjawab perkembangan sosial politik masyarakat yang terus berjalan dan sesuai dan ketentuan serta kebutuhan di era otonomi daerah, maka dengan mendasarkan pada peraturan walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota

Mataram secara resmi terbentuk Dinas Sosial Kota Mataram Yang

memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas yang terdiri atas 2 (dua)
  - 1) Sub Bagian perencanaan dan keuangan
  - 2) Sub Bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang yang terdiri atas 3 (tiga) bidang yaitu:
  - 1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, terdiri atas 3 (tiga)

seksi:

- a) Seksi Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat
  - b) Seksi Organisasi, Pengelolaan sumber dan Bantuan Sosial
  - c) Seksi kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial
- 2) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Terdiri Atas 3 (tiga) seksi: a) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial penyandang Disabilitas dan korban NAPZA
- b) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Tindak kekerasan dan perdagangan Orang
  - c) Seksi Rehabilitasi dan pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- 3) Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas 3 (tiga) seksi:
- a) Seksi Perlindungan Kemiskinan perkotaan



**Perpustakaan UIN Mataram**

- b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
- c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- 4) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional

#### **4. Identitas Kantor Dinas Sosial Kota Mataram**

Nama Kantor : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Mataram

AlamatJL : R.A. Kartini No. 3, Monjok Timur, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Kelurahan : Monjok Timur

Kecamatan : Selaparang

Kabupaten : Kota Mataram

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kode Pos : 83122

No. Telp/Fax : +62370623037

#### **5. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Mataram**

Visi: Tercapainya Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara Berkelanjutan.

Misi:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Penanganan penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) dalam Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial.
- b. Meningkatkan Optimisme, kesadaran hidup , Masyarakat yang harmonis, c. Memberdayakan Individu, Keluarga dan Kelompok sosial untuk Meningkatkan taraf hidup Masyarakat
- d. Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta memperkuat system perlindungan dan jaminan Sosial pada Masyarakat.
- e. Mewujudkan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/ Dinas/ Instansi Daerah Kota dan Pusat.<sup>58</sup>

#### **6. Profil Kepala Dinas**

Identitas Pegawai

Nama : Sudirman, S.Sos., SE, MM

Nip : 196706161989031013

Tempat Tanggal Lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1967

<sup>58</sup> Dinal Sosial. Dokumentasi, 7 Mei 2023

Desember 1964

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat Rumah : JL. KH. Ahmad Dahlan, PAGESANGAN

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen

Jabatan Fungsional Terakhir dan AK : Kepala Dinas Sosial

**Tabel 2.1 Rekap Data Pegawai /ASN pada Dinas Sosial Kota Mataram**

<b>JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN</b>		
<b>N O</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	IV	4 Orang
2	III	15 Orang
3	II	9 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 Orang</b>
<b>JUMLAH PEGAWAI/ASN BERDASARKAN ESELON</b>		
<b>N O</b>	<b>ESSELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1	II	1 Orang
2	III	4 Orang
3	IV	10 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 Orang</b>
<b>JUMLAH PEGAWAI/BERDASARKAN JENIS JABATAN</b>		
<b>N O</b>	<b>JENIS JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Struktural	15 orang
2	Fungsional (arsiparis)	1 Orang
3	Staf	12 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 Orang</b>

Sumber; *Dinas Sosial Kota Mataram 1 januari 2023*

Berdasarkan Tingkat Golongan diatas, oleh karena itu alangkah baiknya jika pangkat dengan penamaan seperti yang di atas secara tegas mencerminkan pula tuntunan yang berbeda. Maka dari itu peneliti mengungkapkan berdasarkan data yang ada.

Salah satu pertimbangan menjadi abdi Negars mengeni pangkat, golongan dan jabatan. Karena memang profesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau yang dikenal sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara),

tetap menjadi bidang pekerja yang menjanjikan. Dari beberapa yang termasuk pegawai golongan di tingkat jabatan ASN sebagai berikut:

- a. Sudirman, S.Sos., SE, MM, (Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Mataram)
- b. Andi Darwis, ST (selaku Sekertaris Kepala Dinas)
- c. H. Fajar Pamungkas, SE, (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial)
- d. Zulfa Nurazizah, S.Psi, Msi, (Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas da Korban NAPZA)
- e. Dra. Rahmi, (Kepala Seksi Kepahlawanan dan Baiq Ainan Penyuluhan Sosial)
- f. Sri Yulianti, SE, (Kepala Bagian Keuangan)
- g. Emma Suryani, SSTP. (Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian)

Dari Golongan ESELON sendiri adalah tingkat jabatan struktural.

ESELON tertinggi sampai ESELON dan jenjang pangkat untuk setiap ESELON, Jadi secara berpangkat, personalnya sudah berpangkat PEMBINA yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. Dari jabatan tersebut ada beberapa golongan ESELON yang ada di Dinas Sosial Kota Mataram Sebagai Berikut: a. Raehan SE, (Kepala Seksi Jaminan Keluarga)

- b. Lalu Andi Sazali, SST, (Kepala Seksi Korban Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Bencana Sosial)
- c. Hj. Nita Yulia Herawati, SE. (Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan dan Jaminan Sosial)
- d. Marlina, BA. (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial)

**Tabel 2.2 Rekap Data Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA	9 Orang
2	D3	1 Orang
3	S1	17 Orang
4	S2	1 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>28 Orang</b>

Sumber; *Dinas Sosial Kota Mataram 1 Januari 2023*

Berikut Mengenai Keadaan Pegawai dalam Suatu Lembaga tidak lepas dari Unsur-unsur yang terkait didalamnya meliputi Ketua, Sekretaris, dan Sebagainya. Semua Unsur-Unsur yang diatas atas adalah satu-kesatuan yang tidak bisa dilepaskan sehingga tujuan menumbuh

kembangkn pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Sosial Kota Mataram dapat tercapai.

## 7. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial di Indonesia

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- d. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- e. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- f. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

## 8. Data Jumlah dan Jenis PMKS Pemulung

**Tabel 2.3 Jumlah Pemulung Ibu Rumah Di Kelurahan Jempong Baru** a. Data Jumlah Pemulung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu BQ. Safnini Mardianti Star Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial Data terakhir pemulung yang ada di Dinas Sosial 2022 berjumlah 34 orang.<sup>59</sup> Adapun jumlah pemulung yang ada di Dinas Sosial dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Ibu Rumah Tangga Pemulung	Tempat Tinggal
1	Siti Nur Handayani	Jempong Baru
2	Rusnah	Jempong Baru
3	Sapiah	Jempong Baru
4	Marinah	Jempong Baru
5	Salimah	Lingkar Selatan
6	Erni Kariati	Lingkar Selatan
7	Mulisah	Lingkar Selatan
8	Sakrah	Lingkar Selatan
9	Muliana	Lingkar Selatan
10	Haeoroh	Lingkar Selatan
11	Hikpiani	Lingkar Selatan
12	Baik Eka	Lingkar Selatan
13	Rumisah	Jempong Barat
14	Sarima	Jempong Barat

<sup>59</sup> Safnini Mardianti Star Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Wawancara, 02 Februari 2023

15	Arbatun	Jempong Barat
16	Jumisah	Jempong Barat
17	Manaah	Jempong Barat
18	Turkiah	Jempong Barat
19	Sapnatun	Jempong Barat
20	Sunandarmina	Jempong Barat
21	Rohana	Jempong Barat
22	Keson	Lingkar Selatan Mapak Dasan
23	Siti aisah	Lingkar Selatan Mapak Dasan
24	Marisah	Lingkar Selatan Mapak Dasan
25	Denita Wasim amerlia	Lingkar Selatan Mapak Dasan
26	Suharti	Lingkar Selatan Mapak Dasan
27	Hanipah	Lingkar Selatan Mapak Dasan
28	Siti julaeha	Lingkar Selatan Mapak Dasan
29	Karni	Lingkar Selatan Mapak Dasan
30	Padliah	Lingkar Selatan Mapak Dasan
31	Misnah	Jempong Timur
32	Junih Karni	Jempong Timur
33	Nalisa alpiani	Jempong Timur
34	Kusniati	Jempong Timur

Sumber; Dinas Sosial Kota Mataram

### 9. Data Jumlah Bantuan Pendidikan Pelatihan Keterampilan Pemulung dan Permakanan Ibu Rumah Tangga Pemulung. a. Data Jumlah Pemulung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu BQ. Safnini Mardianti Star Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial Data terakhir pemulung yang ada di Dinas Sosial berjumlah 48 orang.<sup>60</sup> Adapun jumlah data pemulung yang mendapat bantuan dan pelatihan yang ada di Dinas Sosial dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Data Bantuan dan Program Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Dinas Sosial Kota Mataram.**

NO	Nama Ibu Rumah Tangga Pemeulung	Tempat Tinggal	PMKS
1.	Siti Nur Hadrayani	Jempong Baru	Pemulung
2.	Sadinah	Jempong Baru	Pemulung
3.	Rusnah	Jempong Baru	Pemulung
4.	Sapiah	Jempong Baru	Pemulung
5.	Marinah	Jempong Baru	Pemulung

<sup>60</sup> Safnini Mardianti Star Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Wawancara, 02 Februari 2023

6.	Salimah	Jempong Baru	Pemulung
7.	Erni Karianti	Jempong Baru	Pemulung
8.	Muliasih	Jempong Baru	Pemulung
9.	Sakrah	Jempong Baru	Pemulung
10.	Mukiyana	Jempong Baru	Pemulung
11.	Haeroh	Jempong Baru	Pemulung
12.	Harpiani	Jempong Baru	Pemulung
13.	Siti Suhaebah	Jempong Baru	Pemulung
14.	Mariani	Jempong Baru	Pemulung
15.	Baiq.Eka Susilawati	Jempong Baru	Pemulung
16.	Rumisah	Jempong Baru	Pemulung
17.	Sarimah	Jempong Baru	Pemulung
18.	Kamariah	Jempong Baru	Pemulung
19.	Raisah	Jempong Baru	Pemulung
20.	Arbatun	Jempong Baru	Pemulung
21.	Jumisah	Jempong Baru	Pemulung
22.	Turkiah	Jempong Baru	Pemulung
23.	Hayati	Jempong Baru	Pemulung
24.	Senimah	Jempong Baru	Pemulung
25.	Mana Ah	Jempong Baru	Pemulung
26.	Saptunah	Jempong Baru	Pemulung
27.	Sudarmina	Jempong Baru	Pemulung
28.	I.Wati Suryaningsih	Jempong Baru	Pemulung
29.	Rohana	Jempong Baru	Pemulung
30.	Keson	Jempong Baru	Pemulung
31.	Miase	Jempong Baru	Pemulung
32.	Siti Aisah	Jempong Baru	Pemulung
33.	Marisa	Jempong Baru	Pemulung
34.	Senita Amelia	Wasim Jempong Baru	Pemulung
35.	Junia Karni	Jempong Baru	Pemulung
36.	Suhar Tini	Jempong Baru	Pemulung
37.	Hanipa	Jempong Baru	Pemulung
39.	Karni	Jempong Baru	Pemulung
40.	Naisila Alpiani	Jempong Baru	Pemulung
41.	Heny Wardani	Febri Jempong Baru	Pemulung
42.	Maria Ulfa	Jempong Baru	Pemulung
43.	Siti Zulaehah	Jempong Baru	Pemulung
44.	Khusniati	Jempong Baru	Pemulung

4	Padliah	Jempong Baru	Pemulung
5.			
46.	Samirin	Jempong Baru	Pemulung
47.	Misnah	Jempong Baru	Pemulung
48.	HS. Tania	Jempong Baru	Pemulung

Sumber: *Dinas Sosial Kota Mataram*

## 10. Gambaran Kondisi Para Pemulung

Deskripsi Kehidupan Lima Pemulung dalam penelitian ini adalah lima pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. Berikut deskripsi kehidupan lima pemulung tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi oleh peneliti, kepada 5 (Lima) ibu rumah tangga pemulung yang ada di Kelurahan Jempong Baru. Kondisi pemulung tersebut sangat memprihatinkan, karena rata-rata faktor yang melatar belakangi mereka menjadi pemulung. Diantaranya dalam aspek Tingkat Pendidikan rendah (SD), Dasar dari keluarga tidak mampu, Mau membangun usaha faktor perekonomian rendah dan tidak mempunyai keterampilan. Adapun hasil penelitian tentang ibu rumah tangga pemulung akan peneliti paparkan sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan peneliti yang disampaikan oleh ibu Nurmi pemulung sampah di Kelurahan Jempong Baru yang berhak mendapatkan bantuan dan program dari Dinas Sosial Kota Mataram, Sebagai berikut:

*“Sebelum saya menjadi seorang pemulung, saya pernah usaha akan tetapi kurang modal untuk melanjutkan. Menjadi pemulung merupakan jalan satu-satunya yang sudah saya jalani selama 22 tahun karena memang suami juga seorang pemulung, akan tetapi untuk saat-saat ini saya berperan penuh menjadi pemulung karena suami sedang terbaring sakit, menjadi pemulung dapat membantu kebutuhan saya walaupun tidak seberapa penghasilannya. Saya melakukan aktifitas memulung setiap harinya pada waktu pagi hari jam 7-9 istirahat dan lanjut 2-5 untuk mencari botol, kardus, besi, dan lainnya. Untuk penghasilan dari mencari botol di setiap luar rumah warga perharinya mendapatkan empat kilo dengan jumlah uang yang didapat kurang lebih seratus ribu. Faktor yang melatar belakangi saya menjadi seorang pemulung merupakan rendahnya pendidikan hanya sampai jenjang SD.”<sup>61</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas atau sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Karena seperti yang diketahui

<sup>61</sup> Nurmi Pemulung. Wawancara, 02 Februari 2023

bahwa pemulung yang peneliti temukan pada saat melakukan observasi.

Peneliti menemukan adanya laki-laki, perempuan, anak, dan yang lebih banyak ditemukan perempuan di Kelurahan Jempong Baru. Setiap hari pada pagi, siang, dan dilanjutkan pada sore hari mencari sampah (barang bekas seperti botol, kardus, besi) yang ada di setiap tong sampah untuk dikumpulkan dan dijual.<sup>62</sup>

Wawancara dilakukan peneliti ini yang disampaikan oleh Ibu Mumin pemulung sampah yang ada di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram, Wawancaranya sebagai berikut:

*“Sebelum menjadi pemulung saya sempat usaha warung soto tapi kurang modal, tidak dapat untung dan sempat menjadi pembantu di BTN Kodya Asri juga akan tetapi pekerjaan tersebut terlalu melelahkan bagi saya. Menjadi pemulung merupakan jalan satu-satunya bagi saya, menjadi pemulung sudah saya jalani selama 1 tahun, dan suami saya hamid sudah tidak lagi menjadi pemulung karena permasalahan keluarga sehingga saya berperan penting menggantikan suami menjadi kepala rumah tangga untuk melangsungkan hidup dengan menjadi seorang pemulung. Saya melakukan aktifitas setiap pagi jam 8-10 istirahat dan lanjut sore jam 2-5 untuk memungut botol, kardus, besi, plastik, dan lain sebagainya. Untuk penghasilan saya perhari dapat 2 kilo dengan jumlah uang 4 rb yang di peroleh. Pekerjaan sebagai seorang pemulung merupakan pencaharian tetap saya untuk keluarga.*

*Faktor yang menjadikan saya sebagai pemulung sampah dikarenakan pendidikan rendah hanya sampai SD.”<sup>63</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas yang sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Ibu rumah tangga pemulung yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan observasi. Peneliti melihat pemulung sampah di kelurahan jempong baru rata-rata adalah perempuan. Peneliti setiap pagi, siang, dan sore melihat pemulung mencari barang bekas yang ada di bak sampah, pemulung juga izin ke ke anak kost untuk mencari barang bekas di tong sampah di emperan parkir motor kost, kadang anak kost berinisiatif menyimpan botol-botol bekas untuk dikasih ke pemulung karna anak kost sudah sering melihat pemulung mencari botol ditempat tersebut. Mencari barang bekas merupakan aktifitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pemulung dengan menghasilkan uang untuk melanjutkan kehidupan setiap harinya.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 07 Februari 2023

<sup>63</sup> Mumin Pemulung. Wawancara, 02 Februari 2023

<sup>64</sup> Pemulung di Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 6 Februari 2023

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti, juga disampaikan oleh ibu Retnah pemulung sampah yang ada di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram, Wawancaranya sebagai berikut:

*“Menjadi pemulung sudah 10 Tahun untuk pencaharian yang sudah saya jalani dengan suami bapak Hamidah. Saya beraktifitas memulung setiap pagi pada jam 7-10, istirahat dan lanjut lagi pada sore jam 2-5 mengumpulkan botol-botol, plastik, kardus, besi, dan lain sebagainya. Penghasilan perhari saya mendapatkan 5 kilo dengan jumla uang yang di dapat 10 rb perharinya. Menjadi pemulung adalah pencaharian saya untuk menyambung hidup dengan suami dan anak-anak. Faktor Yang melatar belakani saya dan suami Bapak Hamidah pendidikan sampai SD, dasar dari keluarga tidak mampu, ingin usaha sendiri tapi tidak mempunyai keahlian, tidak ada modal karena memang dasar tidak mampu.”<sup>65</sup>*

Berasarkan hasil wawancara diatas yang sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Selesai azan subuh peneliti melihat para pemulung mulai beraktifitas untuk memelung selesai sholat subuh agar memperoleh banyak barang bekas seperti lebih dominan yaitu botol karna kebanyakan ditempat memulung tersebut orang-orang minum air botolan, dan karena banyaknya pemulung perempuan maka pemulung melakukan aktivitas memulungnya lebih pagi. Pendidikan yang rendah dan keterbatasan akan keterampilan menjadikan pemulung bekerja sebagai pemulung merupakan pekerjaan yang dilakukan karna untuk menambah perekonomian untuk keluarga disetiap harinya.<sup>66</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti, disampaikan oleh ibu Nur Jannah pemulung sampah yang ada di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram, Wawancaranya sebagai berikut:

*“Menjadi pemulung merupakan pekerjaan tetap saya dan Pak suami Munakit. Saya beraktifitas setiap pagi jam 7-9, siang jam 10-12 Sore jam 5-6 mengumpulkan botol, plastik, kardus, buku besi. Untuk perharinya saya mendapatkan 5 kilo dengan harga 2 rb perkilonya, perharinya mendapatkan penghasilan 10 rb dan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penjual kripik gula dan tela-tela dengan bahan dasar terbuat dari ubi. Menjadi pemulung merupakan pekerjaan dan sumber rejeki bagi saya beserta keluarga untuk menghidupi kehidupan sehari-hari dan untuk menyekolakan 2 orang anak sampai selesai. Faktor yang melatar belakangi saya dan pak suami Munakit menjadi seorang pemulung karena faktor sulit untuk mencari pekerjaan karena tidak pernah*

<sup>65</sup> Retnah Pemulung. Wawancara, 06 Februari 2023

<sup>66</sup> Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 4 Februari 2023

*sekolah di karenakan tidak mampu, dasar dari keluarga kurang mampu.”<sup>67</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang sejalan dengan hasil obsevasi yang peneliti lakukan. Peneliti setiap hari melihat pemulung beraktifitas di pagi haris, terkandang pada siang, dan sore. Dimana pemulung keliling di sekiran kelurahan jempong untuk mencari botol, besi, kardus, barang bekas yang tidak terpakai di tong sampah atau depan rumah warga. Pada umumnya pemulung tidak memiliki keterampilan dan kurangnya pengetahuan sehingga tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai menjadi penyebab mereka bekerja sebagai pemulung.

Bekerja sebagai pemulung juga muncul akibat adanya nilai ekonomi dari sampah dan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat di Kelurahan Jempong Baru.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, disampaikan oleh ibu Nur Hasanah pemulung sampah yang ada di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram, Wawancaranya sebagai berikut:

*“Pemulung merupakan pekerjaan sehari-hari saya dan pak suami Muhammad Merpati. Saya beraktifitas bekerja mulai dari jam 8-12 lanjut sore jam 4-5 dengan mengumpulkan botol, plastik, besi, dan lain sebagainya, hasil dari memungut sampah perharinya dapat 15 kilo dengan jumlah uang yang di dapat 30 rb jika hasil dari memungut sampah di kumpulkan 3 hari mendapatkan 46 kilo dengan jumlah uang 92 rb dan saya mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang cuci rumahan sedangkan suami juga berperan sebagai tukang parkir dengan penghasilan perhari Rp. 100 rb. Menjadi pemulung adalah sumber ekonomi bagi keluarga, saya dan suami mencari nafkah dengan menjadi pemulung untuk menghidupi keluarga sehari-hari, dan meyekolahkan 4 orang anak sampai selesai.”<sup>69</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Para pemulung yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan observasi. Peneliti menemukan adanya pemulung laki-laki, perempuan, dan anak terkhususnya ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru. Sebagian besar pemulung mencari sampah sebagai mata pencaharian dalam kehidupannya. Hal ini membuat mereka setiap pagi sampai siang, dan lanjut pada sore yang berhadapan dengan sampah dari hasil barang bekas, botol, kardus, dan

<sup>67</sup> Nur Jannah Pemulung. Wawancara, 06 Februari 2023

<sup>68</sup> Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 1 Februari 2023

<sup>69</sup> Nur Hasanah Pemulung. Wawancara, 03 Februari 2023

besi, baik itu yang berada di bak-bak sampah, jalan raya, depan rumah warga, dan selokan.

Untuk hal ini perempuan memiliki peran ganda dimana perempuan pemulung berperan sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus keluarga dan mencari penghasilan sebagai pemulung. Ketika mendengar, perempuan sebagai seorang pemulung, maka hal yang kita pikirkan adalah bukan sesuatu yang wajar jika seorang perempuan melakukan pekerjaan tersebut, dalam hal ini perempuan dituntut serba bisa, seorang perempuan pemulung memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu rumah tangga, berperan penting menjadi pemulung untuk menghidupi keluarga dan inilah yang terjadi pada saat ini, di Kota Mataram terkhususnya di Kelurahan Jempong Baru terdapat perempuan yang bertahan hidup, dan bahkan menghidupi keluarganya. Rata-rata faktor yang menjadikan seseorang sebagai pemulung di Kelurahan

Jempong Baru merupakan tingkat pendidikan yang rendah, dan terlahir dari keluarga tidak mampu sehingga mereka menjadi seorang pemulung sampah, dan ingin membangun usaha tentu mempunyai keterbatasan pada keterampilan atau keahlian, dan pada modal.<sup>70</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

<sup>70</sup> Pemulung di Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 01 Februari 2023



Gambar 2.1. Dokumentasi dan Wawancara dengan ibu rumah tangga pemulung

### **B. Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram**

Kesejahteraan masyarakat pemulung dilakukan dengan beberapa tahap, yakni perencanaan, pendataan, pemberian bantuan, dan pelatihan serta di dukung dalam PERDA (Peraturan Daerah) Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Mataram dan melaksanakan peraturan Daerah Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) pasal 5 sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu PMKS, meliputi: pemulung dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>71</sup>

Berikut peneliti paparkan lebih jelas tentang upaya kesejahteraan yang dilakukan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung yang berada di kelurahan jempong. Ada beberapa komponen kesejahteraan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mensejahterakan ibu rumah tangga pemulung tersebut. Diantaranya pada komponen Perencanaan, Pendataan, Pemberian Bantuan, dan pelatihan usaha.

<sup>71</sup> Indonesia (24), Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 11 Tahun 2009, LN.2009/No.12, TLN No.4967, LL SETNEG: 32HLM.

Beberapa komponen kesejahteraan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial agar pemulung dapat mengerti akan pentingnya waktu melakukan bantuan tentu ada proses, memanfaatkan bantuan yang di berikan, pelatihan usaha untuk keterampilan pemulung dalam membangun usaha.

Dalam proses mensejahterakan tersebut dilakukan untuk Perencanaan, Pendataan, Pemberi Bantua, dan pelatihan usaha tentu butuh waktu yang cukup lama karna banyak sekali tahapan yang dilalui, dan pelatihan dilakukan. Kesejahteraan yang dilakukan dalam beberapa komponen ini memang benar dijalankan.

## 1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu hal sangat mendasar bagi organisasi.

Keberadaannya membuat segala sesuatu di dalam organisasi tersebut menjadi jelas dan terarah dengan baik. Sehubungan dengan pentingnya memiliki perencanaan yang baik dalam organisasi, maka sudah tentu perencanaan tersebut mempunyai manfaat yang besar pula. Pada hakikatnya setiap perencanaan yang dibuat oleh organisasi memiliki dasar pijakan yang kuat terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Setiap perencanaan yang dibuat selalu mengambil peranan penting dalam rangka mewujudkan kesuksesan organisasi. Setiap organisasi boleh jadi memiliki perencanaan yang berbeda, namun yang tak boleh terlupakan adalah bahwa perencanaan tersebut selalu dibuat dengan bertumpu pada pemikiran tentang kesuksesan organisasi.<sup>72</sup>

Dalam tahap perencanaan, hal utama untuk melaksanakan kebijakan pemerintah harus mengacu pada Visi Misi Walikota Mataram terpilih yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan adapun target Dinas Sosial yaitu pengurangan angka kemiskinan di Kota Mataram Hal tersebut dapat dilihat

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti disampaikan oleh Ibu Sri Yulianti, SE Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keunagan Dinas Sosial Kota Mataram, yang mengatakan bahwa.<sup>73</sup>

*“Dalam perencanaan, yang pertama kita lihat Visi Misi Walikota Kota Mataram dan dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terus dikaitkan dengan perencanaan di masing masing dinas, adapun target Dinas Sosial Kota Mataram yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu pengurangan angka kemiskinan.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil hasil observasi yang peneliti lakukan. Tentu benar adanya yang diungkap

<sup>72</sup> Jurnal INTEKNA, Tahun XIV, No. 2, Nopember 2014 : 102 – 209

<sup>73</sup> Sri Yulianti Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keunagan. Wawancara, 01 Mei 2023

oleh bapak Ibu Sri Yulianti, SE benar adanya dan sudah berjalan. Untuk itu hal tersebut diantisipasi demi kelancaraan yang di rencana sekarang untuk kedepan. Kesejahteraan masyarakat miskin menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Kota Mataram. Selanjutnya, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Dinas Sosial Kota Mataram, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dimulai dengan proses perencanaan. Dalam perencanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat pemulung di Kota Mataram, Dinas Sosial melakukan penyusunan program dan kegiatan terkait pengentasan masyarakat pemulung.<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam perencanaan yang disampaikan oleh Sri Yulianti, SE selaku kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Dinas Sosial Kota Mataram.<sup>75</sup>

*“Bentuk perencanaannya adalah bagaimana Dinas Sosial di bagian Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mengusulkan tim anggaran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tim tersebut melakukan rapat pembahasan anggaran kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, selanjutnya tim anggaran yang menentukan berapa anggaran yang bisa diberikan Kecamatan, Lingkungan, dan Rt. Dalam menyusun sebuah program atau Usulan Dinas Sosial terkait kegiatan harus berorientasi pada program pengentasan kemiskinan. Program yang dibuat harus betul betul menyentuh kepentingan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemudian mengevaluasi perencanaan dari sudut bahwa apakah program yang diusulkan atau direncanakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat pemulung.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil hasil observasi yang peneliti lakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti, melihat evaluasi perencanaan bahwa program yang diusulkan atau direncanakan sepenuhnya memang untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat pemulung. Kesejahteraan masyarakat miskin menjadi salah satu prioritas Pemda (Pemerintah Daerah) Kota Mataram.<sup>76</sup>

Perencanaan harus memiliki kaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin demi tercapainya suatu tujuan dari program yang telah ditetapkan. Perencanaan menjadi suatu yang penting dikarenakan perencanaan merupakan rangkaian apa-apa saja yang dibutuhkan dan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah

<sup>74</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 01 Mei 2023

<sup>75</sup>Sri Yulianti Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Wawancara, 04 Mei 2023.

<sup>76</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 05 Mei 2023

ditetapkan, yang biasanya berkaitan tentang anggaran yang dibutuhkan, tujuan, sasaran, prosedur kemudian program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti yang disampaikan oleh Ibu Sri Yulianti, SE selaku kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Dinas Sosial Kota Mataram.<sup>77</sup>

*“Perencanaan yang dilakukan betul-betul memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pemulung sehingga program-program yang telah direncanakan memenuhi tujuan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram, berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan baru mentukan berapa anggaran yang ditetapkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil hasil observasi yang peneliti lakukan. Peneliti melihat bahwa perencanaan merupakan awal dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial baik secara umum dan secara khususnya berkaitan dengan visi, misi dan program serta kegiatan pendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan. Dalam merencanakan suatu program sejatinya mengikuti visi dan misi Wali Kota Mataram terpilih yang dikaitkan dengan RPJMD (Rencana pembangunan jangka menengah nasional) dan target dinas sosial. adapun target dinas sosial, perencanaan pemberdayaan masyarakat pemulung harus berorientasi pada program pengentasan kemiskinan.<sup>78</sup>

## **2. Pendataan**

Pendataan adalah proses pencarian atau pengumpulan data. Yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan. Sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas kumpulan fakta. Data yang baik harus obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dipergunakan dalam pengambilan keputusan valid data akan meningkatkan ketepatan sasaran dan akurat.<sup>79</sup>

Dalam kesejahtraan masyarakat pemulung, setelah perencanaan maka dilakukan pendataan pemulung. Pendataan dilakukan langsung dari Dinas Sosial, berkoordinasi dengan Kelurahan Jempong Baru, menginformasikan ke Lingkungan, dan Rt untuk mendata masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dan tergolong

<sup>77</sup>Sri Yulianti Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Wawancara, 05 Mei 2023

<sup>78</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 05 Mei 2023

<sup>79</sup> Rosi Adianto, “Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Penduduk Studi Kasus Kecamatan Sungaisel Berbasiss Android dan Web” Pangkalpinang, (Skripsi Program Teknik Informatika STMIK 2017. Hlm 26

masyarakat miskin. Sesuai yang di dijelaskan oleh Ibu DRA. Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.<sup>80</sup>

*“Dalam pendataan masyarakat miskin dilakukan Dinas Sosial, pendataan dilakukan dengan memberi surat dan berkoordinasi dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Kelurahan Jempong Baru, Lingkungan, dan Rt dan tetap dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram, Kelurahan, maupun Rt untuk mencari masyarakat yang berhak mendapat bantuan di Dinas Sosial.*

Dari hasil Observasi yang peneliti lakukan ditarik kesimpulan bahwa pendataan masyarakat miskin melalui lembaga terkait seperti dengan verifikasi PSM Kelurahan Jempong Baru dan validasi oleh Dinas Sosial Kota Mataram.<sup>81</sup>

Kategori miskin suatu masyarakat ketika kehidupannya berada di bawah nilai standar kebutuhan dalam rupiah berupa kebutuhan makanan, pendidikan, masyarakat miskin, sehingga sangat membantu dalam melakukan seleksi masyarakat miskin dan mengetahui masyarakat yang berhak diberikan bantuan dan mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. Hal senada juga yang disampekan oleh Ibu DRA. Sri Hidayanti selaku Kasi Rehabilitas dan Pelayanan Sosial Kota Mataram, bahwa:

*“Masyarakat dikatakan miskin ketika mereka berada dalam kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, seperti dilihat dari kelayakan atau tidaknya seperti rumah yang tidak layak huni, bekerja sehari-hari sebagai pemulung, setelah itu memberi keputusan yang berhal menerima bantuan permakanan, sadang, dan terakhir monat (Monitoring evaluasi).<sup>82</sup>*

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat melaksanakan observasi di Dinas Sosial menemukan bahwa Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kelurahan, Rt, mendata dan mendapatkan data pemulung yang berhak mendapatkan bantuan.<sup>83</sup>

### **3. Pemberian Bantuan**

Secara nyata upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari sistem ekonomi kerakyatanya dan dilakukan dalam program

pembangunan lintas sektoral. Memberikan bantuan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberian bantuan

<sup>80</sup>Sri Hidayanti Kasi Rehabiulitasi dan Pelayanan Sosial. Wawancara, 04 Mei 2023 <sup>81</sup>Dinas Sosial Observasi, 04 Mei 2023

<sup>82</sup>Sri Hidayanti Kasi Rehabiulitasi dan Pelayanan Sosial. Wawancara, 03 Mei 2023 <sup>83</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 02 Mei 2023

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Program tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pemberian bantuan sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya strategi dalam mengujudkan sistem ekonomi masyarakat.<sup>84</sup>

Peran Pemerintah Pusat, Daerah (PEMDA), maupun Dinas Sosial dalam kesejahteraan masyarakat pemulung adalah memberikan bantuan.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk yakni bantuan, program keluarga harapan (PKH), Permakanan (Beras, Telur, Mie instan, biskuit) serta kegiatan pelatihan keterampilan berusaha kepada para pemulung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karunawan, Bapak Karunawan S.H selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, dan Ibu DRA. Sri Hidayanti Kasih Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial di Dinas Sosial Kota Mataram yang mengatakan bahwa:

*“Pemberian bantuan masyarakat miskin berupa bantuan PKH (program keluarga harapan), dan Permakanan (Beras, Telur, Mie Instan, dan buskuit) adalah bantuan dan program yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat miskin terkhususnya kepada pemulung.”<sup>85</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil hasil observasi yang peneliti lakukan.

Hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat meningkatkan taraf masyarakat terkhususnya para pemulung dibuktikan dengan Dinas Sosial Permasalahanya dari pusat yaitu dari mendata kependudukan karena padan andmiduknya misal pada niknya, karena itu masyarakat tidak bisa menerima lagi PKH. Pekerja penerima upah seperti PNS, ASN itu juga akan menjadi penghambat masyarakat menerima PKH karena dia penerima upah. Bantuan Permakanan (Beras, Telur, Mie Instan, Biskuit) sangat membantu pemulung akan tetapi bantuan tersebut keluarnya dua kali dalam setahun, dan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha pemulung ada yang diputus aktivitasnya sebagai pemulung berkembang dengan membangun usaha yang baru dan ada yang masih menjadi pemulung.<sup>86</sup>

<sup>84</sup>Ade Irma Suryani, “peranan dana bantuan langsung tunai dalam upaya Membantu Perekonomian Masyarakat, Studi Kasus Desa Sungai, Kabupaten Kampar” (Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru) Hlm 23.

<sup>85</sup>Karunawan Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial. Wawancara, 03 Mei 2023.

<sup>86</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 02 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Karunawan, S.H selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Mataram mengatakan bahwa:

*“Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Daerah (PEMDA), melalui Dinas Sosial Kota Mataram terkhusus kepada masyarakat di Kelurahan Jempong Baru berupa*

*bantuan PKH(Program Keluarga Harapan) kepada para pemulung ini difokuskan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok miskin, dengan harapan mampu meringankan beban perekonomian walaupun tidak mensejahterakan sepenuhnya, dengan adanya bantuan ini saja sudah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terkhususnya pemulung.”<sup>87</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil hasil observasi yang peneliti lakukan. Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh dinas sosial melalui program bantuan.

Program yang dimaksud, adalah bantuan PKH (program keluarga harapan) kepada para pemulung yang merupakan program penanggulangan kemiskinan yang termasuk kluster/kelompok 1 (satu).

Program penanggulangan kemiskinan kluster/ kelompok 1 (satu) merupakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan kemiskinan yang berada di kota mataram ini serta fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat terkhususnya pemulung untuk kehidupan lebih baik.<sup>88</sup>

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan itu, maka telah diprogramkan beberapa program sosial demi terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, dan pangan) masyarakat miskin. Dinas Sosial

<sup>87</sup> Karunawan Karunawan Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial. Wawancara, 04 Agustus 2023

<sup>88</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 04 Agustus 2023

Kota Mataram yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan kemiskinan. Masalah sosial kemiskinan ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. Adapun bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram.

**a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial, maka tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai pelajaran kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam mengelola bantuan agar dirakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatannya, melalui kebijakan “bersyarat” lebih dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang tunai kepada RTSM (Program Perlindungan Sosial Melalui Pemberian Bantuan Uang Non Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

PKH (Program Keluarga Harapan) difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin melalui pemberdayaan kaum ibu, dan mendorong agar anaknya tetap sehat dan bersekolah sesuai dengan daya yang ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai target peserta.

Dibidang pembiayaannya, anggaran PKH (Program Keluarga Harapan) dialokasikan melalui belanja bansos bidang perlindungan sosial yang bersyarat, artinya bagi RTSM (Program Perlindungan Sosial Melalui Pemberian Bantuan Uang Non Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin) yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan) wajib menyekolahkan anaknya yang berusia 6-18 tahun, melakukan pemeriksaan kesehatan yang mencakup ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, pemeriksaan gizi, serta pemeriksaan imunisasi balita. Dalam jangka pendek PKH (Program Keluarga Harapan) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM (Program Perlindungan Sosial Melalui Pemberian Bantuan Uang Non Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin), sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena minimnya akses RTSM (Program Perlindungan Sosial Melalui Pemberian Bantuan Uang Non Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin) menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin.

Tujuan umum PKH (Program Keluarga Harapan) adalah mengurangi angka dan pemutusan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM (Sumberdaya Manusia), dan perubahan perilaku RTSM (Program Perlindungan Sosial Melalui Pemberian Bantuan Uang Non

Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin) yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Karunawan, S.H selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelolaan

Sumber Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Mataram,  
yang

mengatakan bahwa:

*“Dinas Sosial Kota Mataram  
berkoordinasi dengan Bappeda  
(Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah) yang  
memberi*

*anggaran, untuk Dikes (Dinas Kesehatan) yang memberi program dibidang kesehatan untuk ibu hamil, balita, ibu menyusui, penanganan gizi, Dinas Pendidikan, Depak (Departemen Agama Republik Indonesia) Kota Mataram keterkaitan dengan pendidikan anak sekolah. PKH untuk masyarakat berpendapatan rendah merupakan program dari pusat kementerian sosial dan dana anggaran yang digunakan dari APBN karena program pusat, kita disini hanya membantu menyalurkan dari program pemerintah. Dalam proses penyalurannya pertama Kabupaten ke Kecamatan, Kecamatan ke Desa dan Desa ke penerima bantuan. Kita bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan. Masing- masing di Kecamatan berkoordinasi ke Desa”.*<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil hasil observasi yang peneliti lakukan. Pemberian Bantuan PKH di Kota Mataram telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Hal ini merupakan amanat dari program nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial pelaksana pelaksana pengelolaan penyaluran bantuan ke Kabupaten, ke Kecamatan, dan Desa ke penerima bantuan. Dalam hal penetapan penerima PKH.<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Karunawan, S.H Selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram.<sup>92</sup>

*“Kalau penetapan penerima manfaat program pkh di Kelurahan, Lingkungan, RT melalui musyawarah. Dimana nama calon penerima bantuan ditetapkan secara bersama.*

<sup>89</sup>Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*, (Bandung: FOKUSMEDIA: 2012), hlm. 128.

<sup>90</sup>Karunawan Karunawan Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial. Wawancara, 04 Mei 2023

<sup>91</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 05 Agustus 2023

<sup>92</sup>Karunawan Karunawan Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial. Wawancara, 04 Agustus 2023

*daftar penerima manfaat pkh dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Lurah dan diserahkan oleh camat setempat.”<sup>93</sup>*

Berdasarkan hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme distribusi PKH, Bupati/Wali Kota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada setiap Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO DANA untuk masing-masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat penerimaan bantuan yang akan didistribusikan ke titik distribusi.

Berdasarkan SPPB/DO penerima mengambil uang atau sembako di gudang penyimpanan di setiap agen ATM masing masing. Pelaksanaan distribusi menyerakan bantuan kepada penerima miskin dan manfaat pkh secara perorangan atau kelompok yang mewakili.

Hasil dari Observasi yang dilakukan bertujuan untuk membantu kelompok miskin mendapatkan cukup pangan dan dana. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Murni Selaku Pemulung atau masyarakat miskin penerima program bantuan PKH dan BLT. Bantuan PKH dan BLT dari pemerintah sangat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga saya, saya senang dengan adanya bantuan pemerintah karena mendapatkan uang dan beras yang bermanfaat dapat dilihat bahwa bantuan PKH sangat membantu masyarakat miskin karena mendapatkan bantuan yang jauh lebih membantu. Program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial selama ini sarasanya untuk memenuhi hak kesejahteraan sosial masyarakat.

Dimana pemerintah telah mensubsidi PKH dan BLT untuk masyarakat yang tidak mampu.<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, hal yang sama juga disampaikan oleh Karunawan, S.H selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Mataram, yang mengatakan bahwa:

*“Bantuan langsung tunai bersyarat itulah PKH (Program Keluarga Harapan). Inilah bantuan untuk orang miskin yang memenuhi syarat, artinya punya ibu hamil, punya balita, punya anak sekolah SD sampai SMA, Punya Lansia, Penyandang Disabilitas, itu adalah syarat untuk mendapatkan bantuan.”<sup>95</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin RTSM (Program Perlindungan Sosial

---

<sup>93</sup>

<sup>94</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 22 Agustus 2023

<sup>95</sup>Karunawan Karunawan Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial. Wawancara, 22 Agustus 2023

Melalui Pemberian Uang Non Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program ini dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), (misalnya bagi anak balita dan bagi ibu hamil). Sehingga dapat mengurangi beban masyarakat miskin. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Mataram, terdapat seorang personel dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH.

Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH disetiap kecamatan dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Di setiap kecamatan terdapat pendamping yang mendampingi peserta program keluarga harapan (PKH), dan setiap bulannya pendamping melakukan pertemuan kelompok untuk diberikan arahan dan dibina serta dibimbing”.

Berdasarkan dari hasil Observasi dapat diketahui bahwa di setiap kecamatan memiliki pendamping yang mempunyai tugas yaitu melakukan sosialisasi, pengawasan, pembimbingan dan pendampingan untuk memenuhi komitmen para penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yakni meningkatkan gizi ibu hamil,

anak balita dari masyarakat miskin dengan adanya bantuan dari pemerintah ini digunakan untuk membatu dan keperluan anak, dan jika ada lebihnya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.”<sup>96</sup> dan memprioritaskan bantuannya digunakan untuk memenuhi semua keperluan di antaranya dengan yang dapat menunjang dan prioritas lainnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan (PKH) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayan sosial dasar pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak dan kesehatan meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, anak balita). Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi penanggulangan kemiskinan.<sup>97</sup>

Walaupun kesejahteraan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun daerah terhadap ibu rumah tangga pemulung, para pemulung sampah lah yang paling berperan dalam proses meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, artinya proses kesejahteraan itu terjadi atas dasar kemandirian dan kemauan para pemulung sampah dalam mengubah kehidupannya atau memanfaatkan potensi yang dimilikinya, seperti kemauan mereka untuk keluar dari garis kemiskinan, karena merekalah yang paling mengetahui tentang kebutuhannya dan bagaimana

---

<sup>96</sup>

<sup>97</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 22 Agustus 2023

cara memenuhinya. Adapun upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mensejahterakan dirinya sendiri yaitu sebagian dari pemulung sampah memilih untuk menyekolahkan anaknya dari hasil memulung dengan harapan anaknya tersebut bisa sukses dan memutus rantai kemiskinan, memotivasi dirinya sendiri agar bisa mendapatkan barang-barang bekas lebih banyak dengan cara, menghilangkan sikap malas dan bersandar pada nasib yang biasa mereka alami sehingga mereka bersikap acuh tak, mereka juga berusaha memberikan laporan tentang keadaannya kepada pihak Pemerintah setempat atau kelurahan, hasil dari amatan penulis mengenai pemulung.

Anggaran merupakan suatu unsur utama dalam segala kegiatan atau program apapun. Pengaruhnya sangat terasa, karena tanpa sistem penganggaran yang baik dan cukup, mana mungkin suatu program berjalan dengan baik. Kondisi ini dirasakan dalam sistem penganggaran pusat sampai daerah terhadap program-program kesejahteraan sosial.

Program yang dijalankan selama ini banyak mengalami kendala dan boleh dapat dikatakan belum mencapai target yang diinginkan bersama.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Sri Yulianti,  
SE Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan di Dinas Sosial Kota Mataram, beliau mengatakan bahwa:

*“Selama ini Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program, apabila pusat kekurangan anggaran maka daerah membantu menganggarkan. Selanjutnya, memang program-program sudah berjalan optimal namun masih ada gejala-gejolak yang terjadi karena banyak keluarga sedangkan kekurangan anggaran, maka bantuan diberikan bertahap kepada penerima manfaat. Kita mau untuk membantu semua masyarakat yang miskin tapi kekurangan anggaran itu yang tidak mampu mengkafer semua.”<sup>98</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa anggaran yang dianggarkan untuk program kesejahteraan sosial itu bersumber dari APBN dan APBD. Namun masih belum cukup mengkafer semua masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Dengan itu maka sistem pemberian bantuan dilakukan secara bertahap.

Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemberian anggaran oleh pusat dan daerah dapat membantu masyarakat miskin walaupun tidak merata karna kurangnya anggaran.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Sri Yulianti Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Wawancara, 09 Agustus 2023

<sup>99</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 09 Agustus 2023

Ketersediaannya anggaran menjadikan Dinas Sosial Kota Mataram lebih leluasa untuk membentuk program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemulung.

Penggunaan dana dengan membentuk program-program bantuan beras miskin, bantuan PKH (program keluarga harapan), Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Para Pemulung. Wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Sri Yulianti, SE Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Dinas Sosial Kota Mataram.

*“Penggunaan dana pada Dinas Sosial, penyalurannya kepada bantuan bantuan PKH (Program keluarga harapan) Para Pemulung.”<sup>100</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sejalan dengan hasil hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa penyaluran dana Dinas Sosial Kota Mataram yang di prioritaskan adalah masyarakat yang menerima bantuan. Tujuan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu melakukan kegiatan usaha dan memajemen usahanya sendiri. PKH (Program Keluarga Harapan), Permakanan dan Kegiatan Pelatihan Usaha Para Pemulung secara teratur.



Gambar 2.3. Dokumentasi Penerima PKH

#### **b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Para Pemulung**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spritual

<sup>100</sup> Sri Yulianti Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Wawancara, 04 Mei 2023.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.<sup>101</sup>

Pelatihan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan/keterampilan/sikap melalui pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja atau berbagai kegiatan. Pada umumnya, fungsi pelatihan dalam organisasi adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap yang akan memenuhi kebutuhan bisnis organisasi.<sup>102</sup>

Dalam pelatihan keterampilan ini Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan pemulung di Kota Mataram terkhususnya di Kelurahan Jempong Baru yaitu memberikan kepada pemulung dengan cara di masing-masing kelompok untuk keterampilan berusaha sesuai keahlian para pemulung supaya bisa meningkatkan keterampilan para.

Adapun beberapa bantuan yang diberikan yaitu pelatihan perbengkelan, dan cara menggunakan mesin jahit sehingga mereka mampu meningkatkan keahliannya, mempunyai lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian yang lebih cukup, dan para pemulung selesai melakukan pelatihan akan diberi fasilitas perbengkelan dan mesin jahit.

Berikut wawancara peneliti dengan Ibu DRA. Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial di Dinas Sosial Kota Mataram sebagai berikut:<sup>103</sup>

*“Dinas Sosial Kota Mataram sebelum menjalankan program pendidikan dan pelatihan keterampilan para pemulung, perencanaan awal yang dilakukan melibatkan tim anggaran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tim tersebut melakukan rapat pembahasan anggaran kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Sosial pada Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial selanjutnya melakukan pendataan dilakukan dengan berkoordinasi dan memberikan surat kepada PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Kelurahan Jempong Baru, Lingkungan, dan Rt dan tetap dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram untuk mencari masyarakat pemulung yang berhak mendapat bantuan di Dinas Sosial, dan tim anggaran yang menentukan berapa anggaran yang bisa diberikan. Dalam menyusun sebuah program atau Usulan Dinas Sosial terkait kegiatan harus berorientasi pada program pengentasan kemiskinan.”*

<sup>101</sup> Ar Urwatul Wutsqa: Volumen 2, No. Juni 2022/2

<sup>102</sup> Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Volumen 3 (2): 185-196, Desember 2019 Available at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>

<sup>103</sup> Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Wawancara, 05 Mei 2023

Hasil wawancara diatas sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Karena seperti yang diketahui bahwa Dinas Sosial memang melaksanakan program tersebut untuk membantu para pemulung dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.

Pelaksanaan kesejahteraan yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan observasi. Peneliti menemukan adanya pembekalan dengan memotivasi para pemulung untuk usaha yang lain agar mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, dan meningkatkan perekonomian.<sup>104</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti yang disampaikan oleh Ibu DRA Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial di Dinas Sosial menyatakan bahwa, sebagai berikut.<sup>105</sup>

*“Tujuan dari pembinaan keterampilan agar pemulung dapat mengembangkan keterampilan karena setiap pemulung pasti*

*memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga itulah yang harus dikembangkan dengan pembinaan keterampilan diharapkan pemulung ini menerapkan kemampuan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, demi menopang pekerjaan yang layak dan ekonomi yang memadai.”*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan yang diungkapka di atas relevan dengan hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti. Pihak Dinas Sosial memang melakukan pembinaan keterampilan para pemulung untuk meningkatkan kualitas keahlian mereka.

Menurut pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi di Dinas Sosial tidak menemukan data para pemulung yang layak mendapatkan program bantuan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Sosial. Namun setelah peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menayakan kepada Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Dinas Sosial yaitu Ibu Sri Hidayanti. Dimana peneliti menemukan beberapa pemulung mendapatkan program bantuan pendidikan dan pelatihan.<sup>106</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan disampaikan oleh Ibu DRA. Sri Hidayanti sebagai berikut.<sup>107</sup>

*“Dinas Sosial Kota Mataram menjalankan program bantuan pendidikan dan pelatihan. Bantuan EKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) untuk itu mengecek apakah pemulung*

<sup>104</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 14 Agustus 2023

<sup>105</sup> Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Wawancara 13 Agustus 2023

<sup>106</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 12 Agustus 2023

<sup>107</sup> Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayana Sosial. Wawancara, 15 Agustus 2023

*terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak melalui beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu a.) harus mempunyai identitas kependudukan asli Kota Mataram agar bisa dihimpun datanya untuk mengetahui berhak atau tidaknya untuk mendapatkan bantuan, karena bantuan tersebut tidak diperuntukan untuk pemulung yang tidak menetap, jika pemulung tersebut bukan asli Kota Mataram dan data-data tidak terdaftar di Kelurahan berarti tidak bisa mendapatkan bantuan dari Disas Sosial atau dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah, b. Setelah melakukan pembekalan terkhususnya untuk pemulung yang berhak mendapatkan bantuan yaitu bagi EKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adapun yang masuk kriteria tersebut idealnya ada perubahan perilaku pada pemulung. Jika timbulnya permasalahan ini karena tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun Dinas Sosial.”*

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti hal yang diungkap diatas relevan dengan hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti. Dimana para pemulung di Kelurahan Jempong Baru ada pemulung yang tidak menetap karna berasal dari diluar Kota Mataram.<sup>108</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan yang disampaikan oleh DRA Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sebagaib berikut.<sup>109</sup>

*“Adapun bentuk kesejahteraan yang dilakukan yaitu a. melakukan pembekalan dimana memotivasi para pemulung agar ada perubahan perilaku, jika para pemulung tidak ada perubahan perilaku selesai melakukan untuk usaha yang lain agar mampu merubah kelayakan pekerjaan baru dengan membangun usaha dan meningkatkan perekonomian yang lebih baik, b. kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan program bantuan pendidikan dan pelatihan perbengkelan dan mesin jahit dua kali setahun sudah membuka pekerjaan yang layak untuk para pemulung. EKS (penyandang penyakit sosial) khususnya pemulung merupakan upaya pemerintah melalui dinas sosial kota Mataram kepada para penerima manfaat program pendidikan dan pelatihan keterampilan Dinas Sosial mengharapakan para pemulung memenuhi syarat untuk mendapat program bantuan tersebut agar mampu meningkatnya keterampilan untuk mensejahterakan para pemulung dengan memberikan dorongan berupa bantuan kompreso, dan mesin jahit. Sekarang sudah terbukti bahwa para pemulung boleh berbuat asal para pemulung mau berubah ke hal-hal yang lebih baik, karena dengan adanya perubahan akan ada peningkatan kualitas pada diri seseorang, apalagi pentingnya pemulung memiliki keterampilan yang baik*

<sup>108</sup> Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. Observasi, 19 Agustus 2023

<sup>109</sup>SriHidayantiKasiRehabilitasi dan Pelayanan Sosial. Wawancara, 20 Agustus 2023

*dalam menggunakan bantuan peralatan dari Dinas Sosial agar mampu meningkatkan kelayakan dalam bekerja. Selama ini sulit untuk menjalankan program tersebut karena banyaknya faktor penghambat, Dinas Sosial mampu mensejahterakan para pemulung walaupun tidak semua yang belum ataupun yang sudah terdata bisa mendapatkan program tersebut karena kriteria yang telah ditetapkan.*

Menurut data dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, memang benar adanya bahwa apa yang diungkap oleh Ibu BQ. Safnini Mardianti Star Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial benar terjadi.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat melaksanakan observasi di Dinas Sosial menemukan data terkait program bantuan peralatan misalnya: kompresor, mesin jahit, peralatan gerobak, dan entalase. Jadi salah satu peningkatan perubahan kesejahteraan dirinya dan keluarga itu melalui kesejahteraan ekonomi produktif.<sup>110</sup>



Gambar 2.4. Dokumentasi Bantuan Peralatan

### **c. Bantuan Permakanan bagi EKS**

Wujud kepedulian pemerintah melalui Dinas Sosial kota mataram sebagai upaya rehabilitasi bagi pemerlu bantuan EKS Penyandang Penyakit Sosial bagi keberadaan pemulung sebagai sebagian dari salah satu kategori dalam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Hadirnya program penanggulangan yang diadakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan bimbingan fisik, mental, dan spritual. Dimana bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kasih Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial untuk tahun ini hanya bimbingan sosial saja karena anggaran yang tidak memadai untuk menjalankan banyak program seperti dua tahun lalu.

Dalam upaya bimbingan pemulung yang berada di Kelurahan Jempong Baru dan dilaksanakan di Dinas Sosial. Ada beberapa aspek

<sup>110</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 12 Agustus 2023

bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial untuk mensejahterakan pemulung yang ada di Kelurahan Jempong Baru tersebut. Diantaranya dalam aspek

Bimbingan

Fisik, Mental, Spritual, Sosial,  
bimbingan keterampilan

bagi EKS Penyandang Masalah Penyakit Sosial.

Beberapa aspek pemberdayaan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial pada Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial supaya pemulung dapat memahami akan pentingnya Pendidikan, keagamaan, dan cara bersosial setiap harinya. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dua kali dalam satu tahun kepada pemulung yang berada di Kelurahan Jempong Baru tersebut. Bimbingan yang dilakukan dalam

beberapa

aspek

ini memang bener  
dilakukan karena ada  
data-data

pendukung, dan program bimbingan yang berjalan hanya bimbingan sosial hal tersebut di ungkapkan oleh Ibu DRA. Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial dengan Ibu BQ. Safnini Mardianti Star Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.<sup>111</sup>

*“Sebelum mengeluarkan bantuan program bimbingan sosial, perencanaan awal yang Dinas Sosial di bagian Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan permakanan bagi masyarakat kurang mampu di Keluraha Jempong Baru berupa sadang dan permakanan dengan melibatkan tim anggaran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tim tersebut melakukan rapat pembahasan anggaran kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Sosial pada Ksih Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial melakukan Pendataan masyarakat miskin atau pemulung sebagai melancarkan program bantuan untuk memenuhi kebutuhan walaupun tidak mensejahterakan, selanjudnya melakukan pendataan dilakukan dengan memberi surat dan berkoordinasi dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Kelurahan Jempong Baru, Lingkungan, dan Rt dan tetap dilakukan ferivikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram, Kelurahan, maupun Rt untuk mencari masyarakat yang berhak mendapat bantuan di Dinas Sosial, tim anggaran yang menentukan berapa anggaran yang bisa diberikan Kecamatan, Lingkungan, dan Rt. Dalam menyusun sebuah program atau Usulan Dinas Sosial terkait kegiatan harus berorientasi pada program pengentasan kemiskinan. Selanjudnya kami melakukan Bimbingan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial khususnya pemulung merupakan upaya pemerintah melalui dinas sosial kota Mataram kepada para penerima manfaat bantuan untuk mensejahterakan para pemulung dengan memberikan dorongan berupa bantuan kebutuhan dasar yang<sup>111</sup> Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial. Wawancara, 10 Agustus 2023*

*terdiri dari kebutuhan sandang dan permakanan (Beras, telur, mie instan, biskuit).”*

Hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Karena seperti yang diketahui bahwa Dinas Sosial Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial memang melaksanakan program bimbingan tersebut untuk membantu pemulung EKS (Penyandang Masalah Penyakit Sosial) dalam menjalankan keberfungsian sosial.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu DRA.

Sri Hidayanti Kasi Rehabilitas dan Pelayanan Sosial mengatakan:

*“Tujuan dari Bimbingan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial khususnya pemulung adalah agar pemulung ini dapat memenuhi kebutuhan sandang dan permakanan (Beras, telur, mie instan, biskuit), dengan bimbingan sosial bagi eks yang diberikan oleh dinas sosial pada bantuan kebutuhan dasar yaitu sadang dan permakanan mampu memenuhi kebutuhan para pemulung dalam kebutuhannya. Penerima bantuan permakanan adalah warga/masyarakat Kota Mataram khususnya Pemulung yang ada di Kelurahan Jempong Baru Kota yang tergolong kurang mampu/miskin meliputi: Warga miskin yang terdaftar di DTKS (Data Terpatu Kesejahteraan Sosial) maupun belum terdaftar DTKS (Data Terpatu Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas dan/ atau penyakit tertentu, keluarga miskin. Warga / anggota keluarga yang menerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial reguler (PKH dan BPNT), kepala keluarga atau warga mengajukan permohonan ke kelurahan sesuai jumla anggota keluarga yang diajukan.”*

Bersadarkan wawancara yang peneliti lakukan sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Peneliti melakukan kegiatan observasi terkait obyek penelitian yaitu pembinaan keterampilan yang bertempat di Dinas Sosial, dan peneliti memperoleh informasi yaitu:

Dinas Sosial dua tahun lalu juga melaksanakan pembinaan keterampilan yang dimana terdiri dari keterampilan menjahit, perbengkelan, dan program terbaru adalah pelatihan usaha. Untuk keterampilan menjahit diperuntukkan bagi pemulung, untuk keterampilan perbengkelan diperuntukkan bagi pemulung juga yang ingin belajar, dan pelatihan usaha kasih rehabilitasi memberikan motivasi kepada pemulung untuk mengembangkan terampilan dengan membangun usaha. Keterampilan menjahit dirasakan sangat bermanfaat bagi pemulung karena dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga menjadi bekal bagi masa depan, begitu pula dengan perbengkelan bisa meningkatkan keterampilan dan

<sup>112</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 12 Agustus 2023

meningkatkan perekonomian, dan pelatihan usaha itu bisa meningkatkan keinginan pemulung dalam membangun usaha.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu BQ. Safnini Mardianti Star Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Dinas Sosial sebagai berikut:

*“Pelaksanaan bantuan yang kami memberikan yaitu bantuan permakanan (Beras, telur, mie instan, biskuit) yang diberikan setiap dua (2) kali dalam satu tahun yang melibatkan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tim tersebut melakukan rapat pembahasan anggaran kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Dinas Sosial pada Ksih Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial melakukan Pendataan masyarakat miskin atau pemulung sebagai melancarkan program bantuan tersebut.”*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Peneliti melakukan observasi bahwa Dinas Sosial dua kali dalam 1 tahun 2 kali memberikan bantuan permakanan kepada masyarakat khususnya pemulung.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu DRA. Sri Hidayanti Kasih Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.<sup>113</sup>

*“Alur pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi warga kurang mampu di Kota Mataram khususnya Kelurahan Jempong Baru. Warga di kelurahan memverifikasi data dan survey kondisi penerima tidak sesuai kriteria atau sesuai kriteria, di Dinas Sosial Validasi data permohonan dan penetapan penerima (keputusan Kepala Dinas Sosial) data tidak valid atau data valid, tim anggaran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tim tersebut melakukan rapat pembahasan anggaran kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, selanjutnya menyalurkan permakanan ke kantor kelurahan di Kota Mataram khususnya Kelurahan Jempong Baru, dan warga menerima bantuan sosial permakanan (Beras, telur, mie instan, biskuit)”*

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui Dinas Sosial Kota Mataram berkoordinasi dengan pihak LSM, melalui Kelurahan, Lingkungan, dan Rt untuk mengetahui data-data pemulung yang berhak mengikuti bimbingan. Beberapa instansi tersebut bekerja sama

Perpustakaan UIN Mataram

<sup>113</sup>Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial. Wawancara, 09 Agustus 2023

dalam membimbing pemulung yang ada di Kota Mataram khususnya Kelurahan Jempong Baru.<sup>114</sup>



Gambar 2.5. Dokumentasi Bantuan Permakanan

### C. Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram

Dalam melaksanakan peraturan Daerah Perda No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) pasal 5 sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu PMKS, meliputi: pemulung dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>115</sup>

Dinas Sosial dalam menjalankan perencanaan, pendataan, pemberian bantuan seperti : bantuan PKH (Program keluarga Harapan), dan bimbingan sosial EKS bantuan permakanan yang berada di Dinas Sosial Kota Mataram untuk membantu pemulung di Kelurahan Jempong Baru dalam melanjutkan bantuan permakanan serta membantu kebutuhan. Seperti yang terlihat di Dinas Sosial, dimana Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial menjalankan kerjasama dengan tim anggaran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tim tersebut melakukan rapat pembahasan anggaran kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, selanjutnya menyalurkan permakanan ke kantor kelurahan di Kota Mataram khususnya Kelurahan Jempong Baru, dan warga menerima bantuan sosial permakanan (Beras, telur, mie instan, biskuit)

<sup>114</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 08 Agustus 2023

<sup>115</sup> Indonesia (24), Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No. 11 Tahun 2009, LN.2009/No.12, TLN No.4967, LL SETNEG: 32HLM.

tersebut supaya tetap dapat melanjutkan mendapatkan bantuan permakanaan yang keluar dua (2) kali dalam satu (1) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terkait dengan faktor penghambat/kendala maka, ditemukan beberapa kendala dalam melakukan upaya kesejahteraan terhadap pemulung di kota mataram terkhususnya di Kelurahan Jempong Baru.

Dalam menjalankan kesejahteraan pada pemulung tentunya ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan oleh pihak Dinas Sosial baik itu penghambat/kendala Internal maupun Ekternal. Berdasarkan penelitian ada beberapa faktor kendala dalam menjalankan kesejahteraan terhadap pemulung, mulai dari kekurangan dana, kurangnya donatur, kurang memahami masalah- masalah pemulung, kurang dapat memberikan bimbingan dari segi waktu yang ada, kurangnya SDM, Kurangnya Konsolidasi.

Ketersediaannya anggaran menjadikan Dinas Sosial Kota Mataram lebih leluasa untuk membentuk program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pemulung. Penggunaan dana dengan membentuk program-program bantuan Dinas Sosial juga membentuk program tersebut untuk meningkatkan keterampilan pemulung agar mampu melakukan kegiatan usaha dan manajemen usahanya sendiri. Upaya ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Mataram untuk memenuhi ketahanan pangan terutama pada keluarga yang rentan dan masyarakat yang di katogori tidak mampu atau miskin.

## **1. Faktor Penghambat Internal**

### **a. Kurangnya Anggaran**

Terbatasnya Anggaran juga menjadi suatu penghambat bagi pihak Dinas Sosial Kota Mataram dalam menjalankan pemberian bantuan kepada pemulung yang ada di Kota Mataram terkhususnya di Kelurahan Jempong Baru.

Karena tidak adanya anggaran yang memadai maka program yang dijalankan menjadi kurang efektif, dalam hal ini anggaran menjadi suatu yang menentu demi keberlangsungan dan kelancaran program yang dijalankan. Hal ini diungkapkan oleh DRA. Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial.<sup>116</sup>

*“Keterbatasan anggaran menjadi suatu permasalahan yang paling mendasar bagi kami di Dinas Sosial. Karena banyaknya jumlah penerima yang berhak menerima bantuan untuk pemulung yang beradadi Kota Mataram khususnya kelurahan Jempong Baru. Oleh karena itu, kami disini selalu mengajukan anggara terus menerus untuk mendapatkan anggaran dan bisa menjalankan program dan bantuan yang ada dengan lancar.”*

<sup>116</sup> Sri Hidayanti. Wawancara, 22 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas sangat relevan dengan hasil observasi peneliti selama ini. Dimana penerima bantuan PKH, Permakanan sangat banyak sekali jumlahnya, dengan keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Sosial kesulitan dalam memenuhi banyaknya penerima Bantuan dan itupun harus dijalani dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>117</sup>

## **b. Kurangnya SDM**

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan program kesejahteraan dan anggaran yang terbatas membuat belum bisa memaksimalkan dalam menjalankan tahapan. Hingga pihak Dinas Sosial Kota Mataram masih kurang sehingga masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan suatu proses dalam pengumpulan anggaran. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu DRA. Sri Hidayanti sebagai berikut.<sup>118</sup>

*“Selama ini dalam menjalankan program bantuan termaksud mensejahterakan masyarakat masih kurang efektif karena kekurangan SDM untuk menjalankan program Dinas Sosial yang ada sehingga belum maksimal dalam menjalankan.*

*Kurangnya anggaran sehingga Dinas Sosial kekurangan anggota khusus pemulung dalam melakukan pendataan itupun*

*Dinas Sosial kerja sama denga PSM/Relawan yang ada dikelurahan jempong Baru”*

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwasannya sangat relevan antara hasil observasi yang selama ini dilakukan oleh peneliti. Dalam pelaksanaan Kesejahteraan dan sebagainya masih kurang efektif dan efisien karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga hal tersebut yang membuat pihak Las Dasi kesulitan untuk menjalankan semua program yang ada.<sup>119</sup>

## **1. Faktor Penghambat Eksternal**

### **a. Perencanaan**

Perencanaan anggaran dimana Dinas Sosial mengusulkan anggaran kepada pusat, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), baru bisa menentukan pemberian bantuan yang akan disalurkan disetiap kecamatan, lingkungan, dan rt. Kurangnya anggaran menjadi penghambat Dinas Sosial dalam menjalankan segala keberfungsian program. Kurangnya anggaran yang memadai untuk bisa membantu menjalankan program apalagi program pengetasan kemiskinan di Kota Mataram terkhususnya untuk para pemulung yang ada, padahal yang kita ketahui bahwa anggaran merupakan hal yang paling

<sup>117</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 20 Agustus 2023

<sup>118</sup> Sri Hidayanti. Wawancara, 22 Agustus 2023

<sup>119</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 19 Agustus 2023

menunjang untuk bisa membantu para pemulung. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu DRA. Sri Hidayanti Kasi Rehabilitas dan Pelayanan Sosial.<sup>120</sup>

*“Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin dalam mensejahterakan kelompok pemulung yang ada dalam hal membantu mereka dengan memberikan, PKH (Program Keluarga Harapan), dan Bimbingan Sosila bagi EKS untuk bantuan permakanaan untuk Pemulung secara sosial ekonomi agar para pemulung bisa mandiri. Dinas sosial memberi arahan dan juga bimbingan dalam hal ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karna bisa memanfaatkan program-program yang sudah di jalankan. Namun dalam hal ini belum sepenuhnya para pemulung diberi bantuan, karna dari pihak Dinas Sosial ternyata masih kurang dalam segi anggaran yang memadai agar bisa membantu para pemulung yang ada.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas sangat relevan dengan apa yang peneliti temukan selama melaksanakan observasi. Dimana menurut pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi menemukan penghambat bahwa Dinas

Sosial

ternyata masih kekurangan dalam segi anggaran yang memadai untuk bisa

menjalankan program yang ada.<sup>121</sup>

Dinas Sosial mengusulkan anggaran kepada pusat, kementerian Sosial, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pemerintah Kota Mataram tapi alokasi anggaran dananya terbatas Dinas Sosial mengusulkan sekian akan tetapi yang dicairkan sekian persen. Peneliti malukukan wawancara dengan Ibu DRA.

Sri Hidayanti Kasih Rehabilitas dan Pelayanan Sosial.<sup>122</sup>

*“Kami selaku Dinas Sosial mengusulkan anggaran sekian persen yang cair sekian persen kepada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ada tapi sama-sama terbatas untuk alokasi anggaran dananya, untuk dari pusat, kementerian tidak ada, dan untuk sasaran populasinya penerimanya juga terbatas ataupun sedikit karna jumlah 500 tapi yang bisa Dinas Sosial akomodir 50 orang itupun tidak bisa terbagi di 50 kelurahan Kota Mataram terkhususnya Kelurahan Jempong Baru.*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana wawancara diatas sangat relevan dengan penemuan selama melakukan

<sup>120</sup>Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial. Wawancara, 20 Agustus 2023

<sup>121</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 18 Agustus 2023.

<sup>122</sup>Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial. Wawancara, 20 Agustus 2023

observasi. Karena kurangnya anggaran dari Dinas Sosial akan menghambat pemberian bantuan.<sup>123</sup>

## **b. Pendataan**

Dinas Sosial menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam melakukan pendataan masyarakat yang layak menjadi penerima bantuan, program, dan Dinas Sosial bekerja sama dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Melakukan pendataan tentu mempunyai hambatan bagi Dinas Sosial untuk masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Peneliti melakukan Wawancara dengan Ibu DRA, Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mengenai faktor penghambat untuk masyarakat pemulung.<sup>124</sup>

*“Kurangnya anggota di bagian pendamping khusus pemulung, akan menghambat proses pendataan yang Dinas Sosial butuhkan dan keterbatasan anggaran menghambat Dinas Sosial untuk merekrut pendamping atau pengganti dalam membantu dibidang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan) khususnya pemulung”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas sangat relevan dengan apa yang peneliti temukan selama melaksanakan observasi. Dimana menurut pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa Dinas Sosial mendapat hambatan ketika melakukan pendataan karna tidak mempunyai pendamping khusus untuk pendataan pemulung.<sup>125</sup>

## **c. Kurangnya Anggaran Pemerintah**

Kurangnya anggaran dari Pemerintah yang mau menjadi pemberi anggaran keberlanjutan di Dinas Sosial membuat segala program menjadi terhambat dan kurang maksimal dalam dijalankan. Mengingat dengan kurangnya pemberi anggaran membuat dana menjadi terbatas dan segala program tidak dapat dimaksimalkan karena kekurangan anggaran. Karena dimana anggaran yang didapatkan dari Pemerintah kadang ada yang menerima pengajuan anggaran oleh Dinas Sosial dan tidak ada juga hasil yang diperoleh pas melakukan ajuan anggaran. Dalam wawancaranya dengan peneliti pihak DRA. Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelyanan Sosial Tuna Sosial sebagai berikut:<sup>126</sup>

*“Kami disini keterbatasan dengan Pemerinta yang memberi anggaran baik dari pusat maupun daerah untuk memaksimalkan segala program yang sudah kami rancang. Mengingat anggaran*

<sup>123</sup>Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 19 Agustus 2023

<sup>124</sup>Sri Hidayanti. Wawancara, 20 Agustus 2023.

<sup>125</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 18 Agustus 2023.

<sup>126</sup> Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tunas Sosial. Wawancara 23 Agustus 2023

*yang kami dapatkan yaitu berasal dari pemerinta-pemerinta yang ada kami kekurangan sehingga anggaran kami minim sekali untuk dapat memaksimalkan segala bentuk program bantuan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas sangat relevan dengan apa yang peneliti temukan selama melaksanakan observasi. Dimana menurut pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi menemukan bahwasanya di Dinas Sosial kurang pemerintah yang memberi anggaran menjadi permasalahan yang sesuatu penentu bagi Dinas Sosial dalam memaksimalkan segala programnya.

Mengingat kurangnya pemerintah yang memberi anggaran menjadikan anggaran yang didapatkan menjadi minim dan hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial dalam menjalankan program bantuan.<sup>127</sup> **d. Kurangnya Konsolidasi**

Instansi ini juga belum maksimal menjangkau banyak pihak pemerintah beberapa tahun terakhir ini yang diundang untuk menjalin kerja sama yang baik. Selain itu, Dinas Sosial sudah beberapa kali koordinasi akan tetapi upaya memaksimalkan kelembagaan ini masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh DRA. Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial.



### **BAB III**

<sup>127</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 24 Agustus 2023

## PEMBAHASAN

### A. Peran Dinas Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung

Berdasarkan paparan data dan temuan yang sudah dilengkapi pada bab sebelumnya, peneliti mencoba mendeskripsikan dan mencocokkan data yang ada, serta peneliti juga menemukan beberapa bantuan dari Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung, terkait dengan permasalahan pemulung yang ada di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram.

Dinas Sosial Kota Mataram mempunyai Program Kesejahteraan yang berfokus perencanaan, pendataan, pemberian bantuan yaitu Bantuan PKH, dan Bantuan Permakanan sehingga pemulung di Kelurahan Jempong Baru dapat memperoleh Kesejahteraan dengan diberi Program Bantuan sekaligus.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>128</sup>

#### 1. Perencanaan

Perencanaan yang diberikan oleh Dinas Sosial dijadikan sebagai proses dalam mensejahterakan masyarakat miskin terkhususnya pemulung. Perencanaan sangat penting sebagai dasar dalam proses kesejahteraan menuju kesejahteraan sosial. UU No 11 Tahun 2009, mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan yang dimaksud diatas adalah kaitannya dengan kesejahteraan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam tahap perencanaan yang dilaksanakan kebijakan pemerintah harus mencakup pada Dalam perencanaan yang dilakukan yaitu Visi Misi Walikota Kota Mataram dan dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terus dikaitkan dengan perencanaan di masing masing dinas, adapun target Dinas Sosial Kota Mataram yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram khususnya di Kelurahan Jempong Baru Kota hal tersebut sudah mampu mewakili salah satu aspek dalam kesejahteraan pada program bantuan PKH dan permakanan. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa metode perencana yang digunakan adalah metode yang sesuai dalam aspek kesejahteraan.

<sup>128</sup>Lusya Vivi Gorale, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe" *Jurnal Folume 1 No. 1 Tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi* 6 (2021): 2337-5736

Perencanaan juga sangat penting dalam menjalankan program bantuan.

Hal tersebut program yang sudah berjalan sangat membantu dalam kesejahteraan pemulung karena di bantu pada program PKH, program kebutuhan permakanan tersebut, dan untuk program yang sudah berjalan dapat dievaluasi kemanjuannya sangat membantu masyarakat khususnya pemulung walaupun tidak tergolong sejahtera atau berkepanjangan karena sifatnya sementara. Bukan hanya itu, perencanaan bisa menjadikan pemulung mendapatkan program bantuan lainya untuk tahap selanjudnya. Dengan demikian bisa menciptakan keadaan yang berdaya pada pemulung tersebut. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat perencanaan.

## **2. Pendataan**

Pendataan ini menjadi sangat penting karena sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 mengatakan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam kaitanya dengan kesejahteraan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram sudah mampu memenuhi salah satu aspek dalam kesejahteraan pendataan. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa metode pendataan yang digunakan adalah metode yang sesuai dalam aspek kesejahteraan.

Aspek pendataan juga sangat penting dalam proses mensejahterakan pemulung karena pendataan sangat berpengaruh besar sehingga perlu dilakukan pendataan untuk tau siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Peran pemerintah daerah maupun pusat sangat berpengaruh penting dalam proses anggaran ketika anggaran ada maka dinas sosial akan merekrut kasi khusus pemulung untuk melakukan pendataan pemulung, karena dinas sosial tidak mempunyai kasi khusus pemulung.

Dalam kesejahteraan pemulung, setelah perencanaan maka dilakukan pendataan pemulung. Dinas Sosial dalam melakukan pendataan berkoordinasi dengan Kelurahan Jempong Baru yang dibantu PSM, menginformasikan ke Lingkungan, dan Rt untuk mendata masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dan tergolong masyarakat miskin.

## **3. Pemberian Bantuan**

Pemberian Bantuan sangat penting sebagai dasar dalam proses kesejahteraan menuju kesejahteraan sosial. UU No 11 Tahun 2009, mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam kaitanya dengan kesejahteraan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram sudah mampu memenuhi salah satu aspek dalam kesejahteraan dalam pemberian bantuan. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode yang sesuai dalam aspek kesejahteraan.

Aspek pemberian bantuan juga sangat penting dalam proses mensejahterakan pemulung karena pemberi bantuan sangat berpengaruh besar sehingga perlu disalurkan bantuan untuk masyarakat miskin terkhususnya pemulung di Kelurahan Jempong Baru untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Peran Pemerintah Pusat, Daerah (PEMDA), maupun Dinas Sosial dalam kesejahteraan masyarakat pemulung yang ada di Kelurahan Jempong Baru, adalah memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin dengan harap mampu meringankan beban perekonomian walaupun tidak mensejahterakan sepenuhnya, dengan adanya bantuan ini saja sudah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terkhususnya pemulung untuk yakni bantuan program keluarga harapan (PKH), dan Perumahan (Beras, Telur, Mie instan, biskuit) kepada para pemulung.

Dalam kesejahteraan pemulung, setelah perencanaan maka dilakukan pendataan, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin terkhususnya pemulung. Peran Pemerintah Pusat, Daerah (PEMDA), maupun Dinas Sosial Kota Mataram pada bagian Bapak Karunawan, S.H selaku Kepala Seksi Organisasi Sosial Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, dan Kasih Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyakit Sosial Dinas Sosial dalam melakukan pemberi bantuan.

## **B. Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram**

Menurut Oemar faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datang silih, sehingga menimbulkan faktor penghambat bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.<sup>129</sup> Begitupula dengan kesejahteraan yang dilakukan pada pemulung di Dinas Sosial pastinya ada kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dilakukan.

Peran Dinas Sosial dalam melakukan pemberian bantuan pada pemulung tentunya memiliki faktor penghambat baik dari dalam maupun dari luar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan

<sup>129</sup>SHERLYBsEPTIA Suyedi, Yenni Idrus. Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran. Dalam Jurnal Seni Rupa. Vol. 8, No. 1. 2019, hlm.

pemulung yang dialami oleh Dinas Sosial, yaitu seperti kurangnya anggaran, kurangnya SDM, kurang pemerintah dalam memberikan anggaran. Akan tetapi faktor-faktor penghambat yang dialami dalam menjalankan kesejahteraan pada pemulung tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi proses pemberian bantuan karena kendala-kendala tersebut tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Kendala-kendala yang dialami dalam menjalankan proses kesejahteraan terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

## 1. Faktor Internal

### a. Kurangnya Anggaran

Terbatasnya Anggaran juga menjadi suatu penghambat bagi pihak Dinas Sosial Kota Mataram dalam menjalankan pemberian bantuan kepada pemulung yang ada di Kota Mataram terkhususnya di Kelurahan Jempong Baru. Karena tidak adanya anggaran yang memadai maka program yang dijalankan menjadi kurang efektif, dalam hal ini anggaran menjadi suatu yang menentu demi keberlangsungan dan kelancaran program yang dijalankan.

Keterbatasan anggaran menjadi suatu permasalahan yang paling mendasar bagi kami di Dinas Sosial. Karena banyaknya jumlah penerima yang berhak menerima bantuan untuk pemulung yang

beradadi Kota Mataram khususnya kelurahan Jempong Baru. Oleh karena itu, kami disini selalu mengajukan anggaran terus menerus untuk mendapatkan anggaran dan bisa menjalankan program dan bantuan yang ada dengan lancar.

Dinas Sosial memiliki penghambat terkait dengan keadaan finansialnya. Seperti yang banyak diungkapkan oleh Kasi Dinas Sosial bahwasanya mereka terkendala dengan anggaran dalam menjalankan program bantuan untuk mensejahterakan terkhususnya pada pemulung yang ada di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram. **b. Kurangnya SDM**

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan program kesejahteraan dan anggaran yang terbatas membuat belum bisa memaksimalkan dalam menjalankan tahapan. Hingga pihak Dinas Sosial Kota Mataram masih kurang sehingga masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan suatu proses dalam pengumpulan anggaran.

Selama ini dalam menjalankan program bantuan termaksud mensejahterakan masyarakat masih kurang efektif karena kekurangan SDM untuk menjalankan program Dinas Sosial yang ada sehingga

belum maksimal dalam menjalankan. Kurangnya anggaran sehingga Dinas Sosial kekurangan anggota khusus pemulung dalam melakukan pendataan itupun Dinas Sosial kerja sama dengan PSM/Relawan yang ada dikelurahan jempong Baru.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Perencanaan**

Perencanaan anggaran dimana Dinas Sosial mengusulkan anggaran kepada pusat, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), baru bisa menentukan pemberian bantuan yang akan disalurkan disetiap kecamatan, lingkungan, dan rt. Kurangnya anggaran menjadi penghambat Dinas Sosial dalam menjalankan segala keberfungsian program. Kurangnya anggaran yang memadai untuk bisa membantu menjalankan program apalagi program pengetasan kemiskinan di Kota Mataram terkhususnya untuk para pemulung yang ada, padahal yang kita ketahui bahwa anggaran merupakan hal yang paling menunjang untuk bisa membantu para pemulung.

Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin dalam mensejahterakan kelompok pemulung yang ada dalam hal membantu mereka dengan memberikan, PKH (Program Keluarga Harapan), dan Bimbingan Sosila bagi EKS untuk bantuan permakanan untuk Pemulung secara sosial ekonomi agar para pemulung bisa mandiri.

Dinas sosial memberi arahan dan juga bimbingan dalam hal ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karna bisa memanfaatkan program-program yang sudah di jalankan. Namun dalam hal ini belum sepenuhnya para pemulung diberi bantuan, karna dari pihak Dinas Sosial ternyata masih kurang dalam segi anggaran yang memadai agar bisa membantu para pemulung yang ada.

Dinas Sosial mengusulkan anggaran kepada pusat, kementerian Sosial, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pemerintah Kota Mataram tapi alokasi anggaran dananya terbatas Dinas Sosial mengusulkan sekian akan tetapi yang dicairkan sekian persen. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu DRA. Sri Hidayanti Kasih Rehabilitas dan Pelayanan Sosial.

### **b. Pendataan**

Dinas Sosial menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam melakukan pendataan masyarakat yang layak menjadi penerima bantuan, program, dan Dinas Sosial bekerja sama dengan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Melakukan pendataan tentu mempunyai hambatan bagi Dinas Sosial untuk masyarakat yang layak mendapatkan bantuan.

Kurangnya anggota di bagian pendamping khusus pemulung, akan menghambat proses pendataan yang Dinas Sosial butuhkan dan keterbatasan anggaran menghambat Dinas Sosial untuk merekrut pendamping atau pengganti dalam membantu dibidang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan) khususnya pemulung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas sangat relevan dengan apa yang peneliti temukan selama melaksanakan observasi. Dimana menurut pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa Dinas Sosial mendapat hambatan ketika melakukan pendataan karna tidak mempunyai pendamping khusus untuk pendataan pemulung.<sup>130</sup>

#### **c. Kurangnya Anggaran Pemerintah**

Kurangnya anggaran dari Pemerintah yang mau menjadi pemberi anggaran keberlanjutan di Dinas Sosial membuat segala program menjadi terhambat dan kurang maksimal dalam dijalankan. Mengingat dengan kurangnya pemberi anggaran membuat dana menjadi terbatas dan segala program tidak dapat dimaksimalkan karena kekurangan anggaran. Karena dimana anggaran yang didapatkan dari Pemerintah kadang ada yang menerima pengajuan anggaran oleh Dinas Sosial dan tidak ada juga hasil yang diperoleh pas melakukan ajuan anggaran.

Kami disini keterbatasan dengan Pemerinta yang memberi anggaran baik dari pusat maupun daerah untuk memaksimalkan segala program yang sudah kami rancang. Mengingat anggaran yang kami dapatkan yaitu berasal dari pemerinta-pemerinta yang ada kami kekurangan sehingga anggaran kami minim sekali untuk dapat memaksimalkan segala bentuk program bantuan.

#### **d. Kurangnya Koordinasi**

Penghambat terakhir dalam aspek eksteranal yaitu penghambat dalam melakukan koordinasi dengan Instansi ini juga belum maksimal menjangkau banyak pihak pemerintah beberapa tahun terakhir ini yang diundang untuk menjalin kerja sama yang baik. Selain itu, Dinas Sosial suda beberapa kali koordinasi akan tetapi upaya memaksimalkan kelembagaan ini masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh DRA. Sri Hidayanti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

<sup>130</sup> Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 18 Agustus 2023.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah tangga Pemulung dan

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung adalah sebagai berikut:

1. **Peran Dinas Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung**

Pelaksanaan Kesejahteraan Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam melakukan pemberdayaan pada ibu rumah tangga pemulung melalui beberapa bidang dalam proses kesejahteraan.

Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram kepada ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru meliputi beberapa aspek dalam mensejahterakan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam aspek perencanaan ibu rumah tangga pemulung di Dinas Sosial Kota Mataram dalam tahap perencanaan yang dilaksanakan kebijakan pemerintah harus mencakup pada yaitu Visi Misi Walikota Kota Mataram dan dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(*RPJMD*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

terus dikaitkan dengan perencanaan di masing masing dinas,

adapun target Dinas Sosial Kota Mataram yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Mataram khususnya di Kelurahan Jempong Baru Kota hal tersebut sudah mampu mewakili salah satu aspek dalam kesejahteraan pada program bantuan PKH dan permakanan.

b. Pendataan

Dalam aspek pendataan ibu rumah tangga pemulung dilakukan karena pendataan sangat berpengaruh besar sehingga perlu dilakukan pendataan untuk tau siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Peran pemerintah daerah maupun pusat sangat berpengaruh penting dalam proses anggaran ketika anggaran ada maka dinas sosial akan merekrut kasi khusus pemulung untuk melakukan pendataan pemulung, karena dinas sosial tidak mempunyai kasi khus pemulung. Dinas Sosial dalam melakukan pendataan berkoordinasi dengan Kelurahan Jempong Baru yang dibantu PSM, menginformasikan ke Lingkungan, dan Rt untuk mendata masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dan tergolong masyarakat miskin.

c. Pemberian Bantuan

Dalam pemberian bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan ibu rumah tangga pemulung. Peran Pemerintah

Pusat, Daerah (PEMDA), khususnya Dinas Sosial dalam kesejahteraan masyarakat pemulung yang ada di Kelurahan Jempong Baru, adalah memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin dengan harap mampu memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizui, perawatan, pendampingan membantu meringankan beban perekonomian untuk mensejahterakan, dengan adanya bantuan ini langkah yang di haraokan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan penduduk miskin terkhususnya pemulung

yaitu bantuan program keluarga harapan (PKH),  
dan Permakanan (Beras, Telur, Mie instan,  
biskuit).

2.

**Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota  
Mataram dalam Meningkatkan kesejahteraan  
Ibu Rumah Tangga pemulung yaitu faktor  
penghambat internal dan eksternal: a. Faktor  
Internal**

Faktor penghambat Dinas Sosial dari segi internal  
dalam

melaksanakan program kesejahteraan untuk ibu rumah tangga pemulung yang di Kelurahan Jempong Baru yaitu kurangnya anggaran, dan kurangnya SDM. Beberapa kendala tersebut akan menghambat kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung.

b. Faktor Eksternal

Faktor penghambat Dinas  
Sosial dari segi  
eksternal dalam

melaksanakan program kesejahteraan kepada ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru yaitu perencanaan, pendataan, kurangnya anggaran, dan kurangnya koordinasi. Hal tersebut menjadi penghambat dalam proses kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru sehingga faktor penyebabnya kurang maksimal.

## **B. Saran**

Dengan melihat pada hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kota Mataram, antara lain:

1. Bagi Dinas Sosial Kota Mataram dapat menambah kasih khusus pemulung yang memang kopeten dibidang pendataan pemulung.
1. Program-program yang telah direncanakan dan dilakukan perlu adanya sistem kontrol, pengawasan dan evaluasi secara baik.
2. Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kota Mataram dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemulung melalui pemberdayaan sebaiknya lebih intens koordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga kegiatan kesejahteraan masyarakat pemulung dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**



**Perpustakaan UIN Mataram**

- A Huraerah, "Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia, 2017.
- Abdullah Ramdhani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017).
- Achmad Syakrani, "Studi Tentang Strategi Hidup Pemulung Perempuan Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Bukit Pinang Kota Samarinda,".
- Ade Irma Suryani, "peranan dana bantuan langsung tunai dalam upaya Membantu Perekonomian Masyarakat, Studi Kasus Desa Sungai, Kabupaten Kampar" (Skripsi Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).
- Alfian Muhammad, "Pemberdayaan Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Tamangapa Antang Kota Makassar," *Skripsi* (Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).
- Amri Amir, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Jambi, IPB press, 2009).
- Andi Muhammad Arif Haris, *Pengenalan Masalah Fakir Miskin Di Kelurahan Binong Kecamatan Batunggual Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*, 2019.
- Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerja Sosial*, (Bandung, Pt. Remaja Rosdakarya, September, 2015).
- Bambang Rustanto. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung, PT remaja rosdakarya, 2015).
- Bambang Rustanto. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, 2017.
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rineke Cipta), 1992.
- Candra Jefriyanto, *Pemulung Di Era Milenial (Studi Kasus Di TPA Jamur Labu, Aceh Timur)*, (2019).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Dideng Kadir, *Formasi Sosial Pemulung Potret Keterbelakangan Dalam Pembangunan* (Surakarta: Oase Pustaka, 2016), hlm. 6.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*.
- Fauziah Lamaya, Amir Syarifudin Kiwang, "Studi Pemberdayaan Perempuan (Pemulung), 2022.
- Indonesia (24), *Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 11 Tahun 2009, LN.2009.
- Indonesia (24), *Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin*, UU No. 11 Tahun 2009, LN.2009.
- Jefriyanto, "Pemulung Di Era Milenial (Studi Kasus Di TPA Jamur Labu, Aceh Timur)."
- Jefriyanto, "Pemulung Di Era Milenial (Studi Kasus Di TPA Jamur Labu, Aceh Timur)."
- Jurnal INTEKNA, Tahun XIV, Nopember 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Cetak III (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007).
- Lusya Vivi Gorale, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe*, 2021.
- Lusya Vivi Gorale, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe*, 2021.
- M Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Mawardi dan Nur Hidyati, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pusataka Setia, 2002).
- Miles, M.B, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Mohammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: aparestasi Pustaka Publhiser, 2006.
- Mudiyono dkk, *Dimensi-Dimensi Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: APMD Press, 2005).
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2018). Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2014.
- Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 2011.
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Mataram*, n.d.
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Mataram*.
- Peraturan Walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerka Dinas Sosial Kota Mataram*, n.d.
- Ramlafatma, *Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembungan Akhir (TPA) Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa*, 2021.
- Rismayanti, Bahtair, Bakri, *Strategi Pemerintah Kota Kendari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Prmulung*, 2021.
- Rosi Adianto, "Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Penduduk Studi Kasus Kecamatan Sungaisel Berbasiss Android dan Web" Pangkalpinang, (Skripsi Program Teknik Informatika STMIK 2017).
- Rr. Indah Ria Sulistyarini dan Nur Pratiwi Novianti, *Wawancara Sebagai Metode Efektif Untuk Memahami Perilaku Manusia*, (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012).
- SHERLYBsEPTIA Suyedi, Yenni Idrus. *Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran*, 2017.

- Siti Huzaemah, "Sampah Adalah Berkah; Studi Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan," *Islamic Management and Empowerment Journal*, (2020).
- Siti Nur Fitriyani dan Tri Ahmad Faridh, *Intervensi Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Pada Kelompok Marginal Piyungan* Yogyakarta, 2021.
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*, (Bandung: FOKUSMEDIA: 2012).
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Sudibyo, Agus (2010). "Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban"
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sutarji, "Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung," *Jurnal Geografi* (2022).
- Sutarji, "Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Pemulung." Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Tngutra, "Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makasar" (Sripsi Universitas Makassar, 2017).
- Triono, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Pusaran Desentralisasi Dan Good Governances*. (2011).
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).
- Wilinny, "Analisis Komunikasi Di Pt. Asuransi Buana Independent Medan," *Jurnal Ilmiah Simatek*, 2019.
- Y. Argo Twikromo, *Pemulung Jalanan Yogyakarta* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999).

## **Wawancara/Observasi**

Pemulung. Observasi, 1 Februari 2023



**Perpustakaan UIN Mataram**

BQ. Safnini Mardianti. Wawancara, 02 Februari 2023

Nurmi, Wawancara. Tanggal 02 Februari 2023

Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 07 Februari 2023

Mumin, Wawancara. Tanggal 02 Februari 2023

Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 6 Februari 2023

Retnah, Wawancara. Tanggal 06 Februari 2023

Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 4 Februari 2023

Nur Jannah, Wawancara. Tanggal 06 Februari 2023

Pemulung Di Kelurahan Jempong Baru. Observasi, 1 Februari 2023

Nur Hasanah, Wawancara. Tanggal 03 Februari 2023

Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Observasi. Tanggal 01 Februari 2023

Marjuki dan Fatimah. Wawancara, 07 Februari 2023

Marjuki dan Fatimah. Observasi, 07 Februari 2023

Sudirman. wawancara, 01 Mei 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 01 Mei 2023

Sri Yulianti. Wawancara, 04 Mei 2023.

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 05 Mei 2023

Sri Yulianti. Wawancara, 05 Mei 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 05 Mei 2023

Sri Hidayanti. Wawancara, 04 Mei 2023

Dinas Sosial Observasi, 04 Mei 2023

Sri Hidayanti. Wawancara, Sosial 03 Mei 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 02 Mei 2023

Karunawan. Wawancara, 03 Mei 2023.

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 02 Mei 2023

Karunawan. Wawancara, 04 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 04 Agustus 2023

Karunawan. Wawancara, Pada Tanggal 04 Mei 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi 05 Agustus 2023

Karunawan. Wawancara, 04 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 22 Agustus 2023

Karunawan. Wawancara, 22 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 22 Agustus 2023

Sri Yulianti. Wawancara, 09 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 09 Agustus 2023

Sri Yulianti. Wawancara, 04 Mei 2023

Sri Hidayanti. Wawancara, 10 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 12 Agustus 2023

Sri Hidayanti. Wawancara, 09 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 08 Agustus 2023

Sri Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 20 Agustus 2023

Sri Hidayanti. Wawancara, 22 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 19 Agustus 2023

Hidayanti. Wawancara, 22 Agustus 2013

Sri Hidayanti. Wawancara, 20 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 18 Agustus 2023.

Sri Hidayanti. Wawancara, 20 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 19 Agustus 2023

Sri Hidayanti. Wawancara, 20 Agustus 2023.

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 18 Agustus 2023.

Sri Hidayanti. Wawancara 23 Agustus 2023

Dinas Sosial Kota Mataram. Observasi, 24 Agustus 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara: Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru



Dokumentasi dan Wawancara Bersama Ibu DRA. Sri Hidayanti dan Ibu BQ. Safnini Mardianti Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial

Perpustakaan UIN Mataram



Dokumentasi Dan Wawancara Bersama Pihak Dinas Sosial Kota Mataram

Perpustakaan UIN Mataram

## PEDOMAN OBSERVASI

1. Melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas, dan Kondisi ibu rumah tangga pemulung di Kelurahan Jempong Baru



Kota Mataram

2. Melakukan pengamatan di Dinas Sosial Kota Mataram Melihat kesejahteraan yang dilakukan untuk program kesejahteraan ibu rumah tangga pemulung
3. Data Jumlah dan Jenis PMKS yang ada di Kelurahan Jempong Baru pada Dinas Sosial Kota Mataram
4. Perencanaan, pendataan, pemberi bantuan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram
5. Melihat dokumen-dokumen yang untuk melengkapi data peneliti.  
Sebagai berikut:
  - a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - b) Profil Dinas Sosial Kota Mataram
  - c) Letak Geografis
  - d) Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram
  - e) Identitas Kantor Dinas Sosial Kota Mataram
  - f) Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Mataram
  - g) Profil Kepala Dinas
  - h) Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial di Indonesia
  - i) Data Jumlah Bantuan Permakanan Ibu Rumah Tangga Pemulung.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## **PEDOMAN WAWANCARA IBU RUMAH TANGGA**

### **PEMULUNG DI KELURAHAN JEMPONG BARU**

1. Asslamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

2. Ijin buk, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dari UINMataram Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) mendapatkan tugas akhir

untuk melakukan wawancara, boleh saya butuh sedikit waktu untuk wawancara sebentar?

3. Ibu tidak sibuk kan?

4. Izin buk namanya siapa?

1. Pekerja ibu sehari-hari sebagai apa?

6. Ibu asli mana?

7. Ibu sudah lama melakukan pekerjaan ini?

8. Apa saja yang ibu ambil?

2. Ibu tinggalnya dimana?

10. Terus ibu mulai beraktivitas mulai dari jam berapa sampai jam berapa? 11. Pendapatan ibu perhari berapa?

12. Terus hasil dari memulung dijual dimana?

13. Ibu memulung dimana saja?

14. Kelilingnya jauh sekali ibu nggak cape?

15. Ibu punya keluarga disini ?

16. Ibu, suami, dan anak-anak tinggal dimana?

17. Suami ibu juga seorang pemulung?

18. Anak-anak ibu sekolah?

19. Ibu yang biayain sekolah anak-anak?

20. Ibu sebelum jadi pemulung kerjanya apa?

21. Berapa lama ibu berjualan?

22. Sekarang ibu masih jualan?

23. Kenapa ibu tidak lagi berjualan?

24. Kenapa ibu jadi seorang pemulung?

25. Pendidikan ibu sampai apa?

26. Kenapa dulu ibu sekolah sampai SD?

27. Buk, kenapa ibu memilih pekerjaan seperti ini, kenapa tidak mencari pekerjaan tang lain?

28. Tapi ibu pernah nggak cari pekerjaan lain?

29. Terus nggak dapat juga?

30. Pernah nggak selama jadi pemulung dapat bantuan dari pemerintah atau siapa gitu?

31. Bantuan apa buk?

32. Kenapa uang yang didapat dari bantuan tidak menggunakan usaha buk? 33. Hasil mulung perhari dapat berapa buk?

34. Kenapa hasil mulung dapatnya sedikit buk?

35. Kalau dapat banyak biasanya pas kapan?

36. Pernah nggak pas nyari barang bekas di marahin sama orang?



**Perpustakaan UIN Mataram**

37. Harapan ibu buat anak apa?
38. Buk teman-teman pemulung dari mana saja?
39. Teman-teman pemulung suka ganggu atau giaman gitu?
40. Apa faktor yang melatar belakangi ibu menjadi pemulung sampah? 41. Ibu ambil botol buat apa?
42. Terimakasih buk. Wasallamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

### **PEDOMAN WAWANCARA DI DINAS SOSIAL**

1. Asslamu Alaikum Warhamtullahi Wabarakatuh.....
1. Ijin, maaf mengganggu waktunya dan aktifitasnya sebentar. Saya dari UINMataram Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) mendapatkan tugas akhir untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial, boleh saya butuh sedikit waktu untuk wawancara sebentar?
2. Izin mengganggu waktunya sebentar?
3. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram
4. Apa faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Mataram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram
5. Apa saja program bantuan Dinas Sosial Kota Mataram untuk meningkatkan kesejahteraan pemulung?
6. Di Dinas Sosial pada bagian apa saja yang mengurus tentang pemulung?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

### **PEDOMAN WAWANCARA BANTUAN PKH**

1. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
7. Izin, mohon maaf sebelumnya karna telah mengganggu aktivitasnya. Saya dari UINMataram Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) ingin melakukan penelitian?
8. Izin mengganggu waktunya sebentar?
9. Dalam menjalankan program bantuan bagaimana perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan PKH yang dilakukan Dinas Sosial?
10. Dalam menjalankan program PKH faktor penghambat apa saja yang Dinas Sosial hadapi:
11. Bagaimana perkembangan program keluarga harapan untuk masyarakat miskin khususnya pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram?
12. Dalam pendataan penerima PKH Dinas Sosial berkoordinasi dengan siapa saja ?
13. Penerima PKH tentu mempunyai persyaratan masuk kriteria layak atau tidak untuk menjadi penerima?

9. Untuk anggaran bantuan PKH Dinas Sosial bekerjasama sama dengan instansi apa saja ?

### **PEDOMAN WAWANCARA BANTUAN PERMAKINAN**

1. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..



Perpustakaan UIN Mataram

1. Izin, buk saya dari mahasiswa UINMataram Jurusan Pengembanagan Masyarakat Isalam (PMI) maksud dan tujuan saya datang ke Dinas Sosial ingin melakukan penelitian?
3. Mohon maaf sebelumnya ibu telah mengganggu aktifitasnya?
4. Dalam menjalankan program bantuan bagaimana perencanaan, pendataan, dan bantuan permakanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial?
2. Dalam menjalankan program permakanan faktor pengahambat apa yang Dinas Sosial hadapi?
3. Dalam pendataan pemulung yang penerima bantuan permakanan Dinas Sosial berkoordinasi dengan siapa ?
4. Untuk anggaran bantuan permakanan Dinas Sosial bekerjasama sama dengan instansi apa saja ?
  8. Apa saja syarat kelayakan dan tidaknya penerima bantuan permakanan?



Perpustakaan<sup>88</sup> UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB  
Web: [id.uinmataram.ac.id](http://id.uinmataram.ac.id), email: [fidk@uinmataram.ac.id](mailto:fidk@uinmataram.ac.id)

Nomor : *56/Un.12/PP.00.9/FDIK/6/2023*  
Lampiran : 1 (satu) Berkas Proposal  
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Mataram, 05-06-2023

Kepada Yth.  
Kepala BANGKES BANGPOL PROVINSI NTB  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

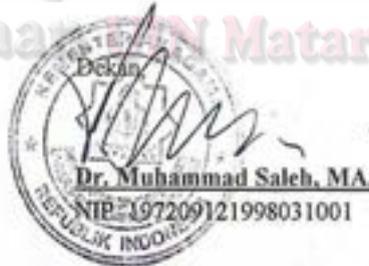
Nama : Novitasari  
NIM : 190302093  
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Tujuan : Izin Penelitian  
Judul : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kontribusi Pemulung Perempuan Ibu Rumah Tangga Terhadap Perekonomian Keluarga Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi. **M A T A R A M**

Demikian dan atas kesediaan Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelende - Kecamatan Kediri - kode pos 83362  
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: [brida@ntbprov.go.id](mailto:brida@ntbprov.go.id) Website: [brida.ntbprov.go.id](http://brida.ntbprov.go.id)

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 /3650/ II – BRIDA / VI / 2023

**TENTANG**  
**PENELITIAN**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
  - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - Surat Dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN MATARAM, Nomor : 562/U.n.12/PP.00.9/FDIK/6/2021 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
  - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/1405/VI/R/BKBDN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

**MEMBERI IZIN**

Kepada ;

Nama : Novitasari  
NIK / NIM : 5206084205020001 / 190203093  
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram  
Alamat/HP : DESA, Rora, Kec Donggo, Kab. Bima / 081236188225  
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kontribusi Pemulung Perempuan Ibu Rumah Tangga Terhadap Perekonomian Keluarga Di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram

Lokasi : Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram  
Waktu : Juni - Agustus 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: [litbang.brida@ntbprov.go.id](mailto:litbang.brida@ntbprov.go.id)

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di Lombok Barat  
Pada Tanggal, 26 Juli 2023

KEPALA BIDANG LITBANG, INOVASI  
DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN  
INOVASI DAERAH PROVINSI NTB,

  
**LALU SURYADI SP. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB ( Sebagai Laporan );
- Wakota Mataram ;
- Kepala Dinas Sosial Kota Mataram ;
- Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram ;
- Camat Sekarbela Kota Mataram ;
- Lurah Jempong Kec. Sekarbela Kota Mataram ;
- Yang Bersangkutan ;
- Arsp.



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**DINAS SOSIAL**

Jl. RA Kartini No. 3 Meejok Mataram Telp/ (0370) 623037  
E-mail : dinas.sosial@irm@gmail.com

Mataram, 26 September 2023

Nomor : 000.9.b/347/Dinasos/IX/2023  
Lamp : -  
Perihal : Keterangan Telah Melakukan  
Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu  
Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Mataram  
di -  
Mataram

Memperhatikan Surat Saudara No. 861/U.n.12/PP.009/FDIK/09/2023,  
tanggal 13 - 09 - 2023, Hal : Pemohonan rekomendasi Penelitian, dipermaklumkan  
bahwa mahasiswi An :

Nama : Novitasari  
NIM : 190302093  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram

Telah melakukan Penelitian pada Dinas Sosial Kota Mataram dengan Judul  
Penelitian : " Peran Dinas Sosial Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan  
Masyarakat Pemulung di Kelurahan Jempong Baru Kota Mataram "

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya

Perpustakaan UIN Mataram

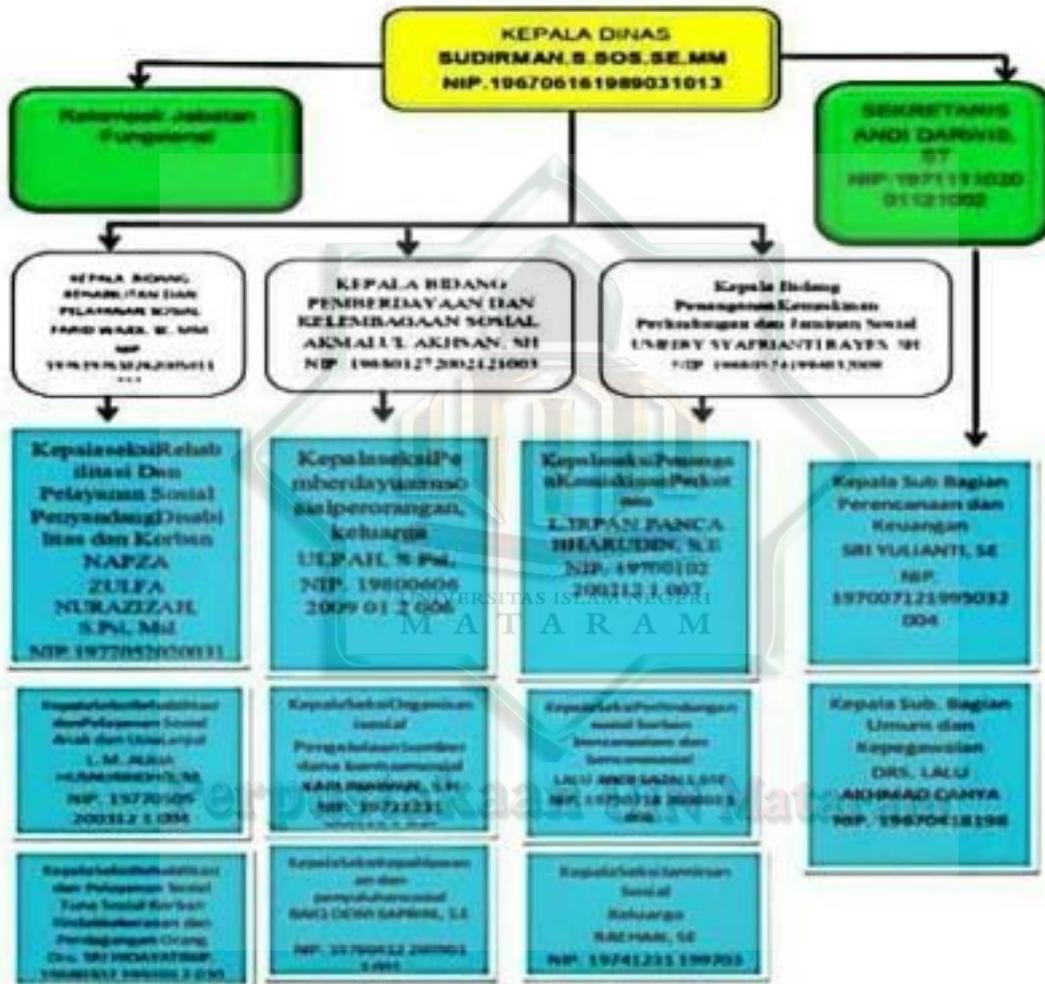
Kepala Dinas Sosial

Kota Mataram,



SUDIRMAN, S.Sos, SE, MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670616 198903 1 013

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KOTA MATARAM**



**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Mawitara Pembimbing I : Prof. Dr. Subianto, M. Ed  
 NIM : 19072093 Pembimbing II : Zaenudin Amrullah, M. A

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	00/02/23	Perbaiki judul dan subjudul dan rumusan masalah - kerangka	
2	12/02/23	Konsep, pelayan kebid'asan Pembid'asan.	
3	05/03/23	Ace utup ke Pemb. I	
4	21/03/23	Perbaiki BAB I - II pada Landas teori dan defn	
5	07/03/23	Perbaiki BAB II dan kerangka.	
6	02/01/24	Perbaiki BAB II	
7		Perbaiki BAB III - IV	
8		Perbaiki Abstrak + pada analisis pada BAB I - III	
9	10/01/24	Ace utup ke Pemb. I	

Judul Skripsi :



Pembimbing II,  
  
 Zaenudin Amrullah, M. A  
 NIP. 193702022019031019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempang Mataram NTB  
Web: [da.uinmataram.ac.id](http://da.uinmataram.ac.id), email: [da@uinmataram.ac.id](mailto:da@uinmataram.ac.id)

**KARTU KONSULTASISKRIPSI**

Nama : Albotassari  
NIM : 190201005

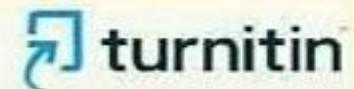
Pembimbing I : Prof. Dr. Subianto, MAG  
Pembimbing II : Zuhriyudin Amrulloh, S.H

NO	HARI TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	24/09/23	kebutuhan konsep pengantar	[Signature]
2	03/10/23	pendahuluan di SD dan UIN Bab I dan Bab II	[Signature]
3	2/11/23	Jelaskan dan mendetailkan profil penerapan pemulung	[Signature]
4	16/12/23	Bab III dan Bab IV	[Signature]
5	11/1/24	Penutup: Kesimpulan dan saran-saran penulis	[Signature]
6	15/1/24	Bab I - IV dan Bab V	[Signature]
7			
8			
9			

Judul Skripsi :

Metaram  
Mengetahui  
Dekan  
[Signature]  
Dr. Mohammad Saleh, MA.  
NIP. 197201119950031001

Pembimbing I  
[Signature]  
Prof. Dr. Subianto, MAG  
NIP. 19720720200001001



# UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:3723/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/01/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**NOVITASARI**

190302093

FDIKPMI

Dengan Judul SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN IBU  
RUMAH TANGGA PEMULUNG DI KELURAHAN JEMPONG BARU KOTA MATARAM

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 13 %**

Submission Date : 12/01/2024



UPT Perpustakaan

UIN Mataram

Hum  
M Hum

NIP. 197608282006042001



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:3330/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/01/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**NOVITASARI**  
190302093

FDIK/PMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.

